

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI
(SUATU ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
DALAM BUKU ISLAM MENGGUGAT POLIGAMI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh:

TOGUAN

NIM. 11721100724

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M/1442 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (SUATU ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DALAM BUKU ISLAM MENGGUGAT POLIGAMI”**, yang ditulis oleh :

NAMA : TOGUAN

NIM : 11721100724

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Ramadhan 1442 H

30 April 2021

Pembimbing Skripsi,

Mutasir, M.Sy
NIK. 130217036

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (SUATU ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DALAM BUKUM ISLAM MENGGUGAT POLIGAMI)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **TOGUAN**
 NIM : 11721100724
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 08 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : DARING/ Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

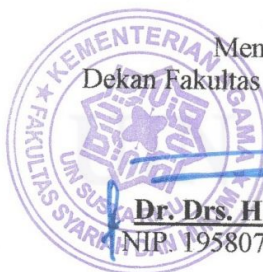
Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H., MH

Penguji I
Dr. Johari, M.Ag

Penguji II
Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

ABSTRAK

Toguan, 2021: Konsep Adil dalam Poligami (Suatu Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Buku Islam Menggugat Poligami)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan kontroversial poligami yang perdebatannya melahirkan berbagai macam pendapat, terutama pada konsep keadilan sebagai syarat utama dalam poligami. Mayoritas ulama memaknai keadilan poligami hanya dalam aspek materi saja, namun ada juga ulama yang memaknai keadilan poligami secara materi dan immateri (cinta dan kasih sayang). Siti Musdah Mulia adalah salah satu tokoh yang menitikberatkan keadilan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami. Dari pendapat Musdah Mulia tersebut, melahirkan kesimpulan hukum poligami *haram lighairihi*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep adil dalam poligami menurut Siti Musdah Mulia dan bagaimana analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Konsep adil dalam poligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep adil dalam poligami menurut Siti Musdah Mulia dan analisa terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang konsep adil dalam poligami.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku *Islam Menggugat Poligami* sebagai bahan hukum primernya. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang relevan dengan penelitian ini seperti *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasinya, terjemahan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* serta literatur lainnya. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam poligami menurut Musdah Mulia harus secara materi dan immateri. Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, yang hanya mensyaratkan keadilan poligami secara materi saja. Berbedanya pendapat Musdah Mulia dengan mayoritas ulama disebabkan: *Pertama*, Musdah Mulia menekankan keadilan immateri menjadi suatu yang harus dalam praktik poligami. *Kedua*, adanya anggapan Musdah terhadap hadist Nabi bahwa Nabi melarang Ali berpoligami karena Ali tidak mampu berlaku adil dan diperkuat dengan ancaman Nabi terhadap suami yang tidak adil, dan *ketiga*, banyaknya dampak negatif yang disebabkan ketidakadilan oleh suami yang berpoligami.

Kata Kunci: *adil, poligami dan Siti Mudah Mulia.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar IMelihat dan limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul: **Konsep Adil dalam Poligami (Suatu Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam buku Islam Menggugat Poligami)**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi.

Penysunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Sayrif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Nasruddin (Alm) dan Ibunda tercinta Musdalipa, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta do'a restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Drs H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Bapak Drs H. Promadi, MA., Ph.d selaku Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M. Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 5. Bapak Henrizal Hadi, Lc., M.A. selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan dan memotivasi hingga terselesaikan pendidikan dengan baik.
 6. Bapak Mutasir, M.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.
 8. Kepada seluruh pegawai Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum
 9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta rekan-rekannya yang telah memberikan pelayanan fasilitas literatur sebagai sumber data primer dan sekunder dalam pembuatan skripsi ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada teman-teman satu lokal, satu jurusan, satu organisasi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selama ini sudah seperti saudara sendiri bagi penulis. Terimakasih yang telah menemani dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, arahan dan izin yang diberikan kepada Penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya, amin.

Pekanbaru, 30 April 2021

Toguan
NIM 11721100724

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA	
A. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia.....	16
B. Riwayat Pendidikan dan Latar Belakang Intelektual Siti Musdah Mulia	18
C. Aktivitas-aktivitas dan Karya-karya Siti Musdah Mulia	31
D. Dasar-Dasar Istimbath Hukum Siti Musdah Mulia	46
BAB III TINJAUAN TEORI KEADILAN DAN POLIGAMI	
A. Teori Keadilan	49
1. Pengertian Keadilan	49
2. Teori Keadilan Persepektif Barat	49
3. Teori Keadilan Persepektif Islam	52
B. Teori Poligami.....	56
1. Pengertian Poligami	56
2. Sejarah Poligami	58
3. Hukum Poligami	64
4. Syarat-syarat Poligami	77
5. Alasan-alasan Berpoligami	94
6. Hikmah Poligami	98

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Adil dalam Poligami Menurut Siti Musdah Mulia	. 101
B. Analisis Konsep Adil dalam Poligami Menurut Siti Musdah Mulia	121

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	143
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA



A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sejak dulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Ikhtilaf itu terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki para ulama dalam memahami teks-teks agama. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sulit dipertemukan. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya bukan saja sesuatu yang dibolehkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (disunnahkan).¹ Sementara kelompok lainnya, menolak kebolehan poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasi salah satu pihak, terutama perempuan. Kedua pandangan itu, tentu saja, tidaklah muncul secara dadakan, melainkan dibangun oleh metodologi yang diyakini sama-sama kuat. Hal inilah yang membawa persoalan poligami menjadi sulit untuk dikompromikan.

Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, yaitu pasal 55-59.² Begitu juga Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 3-5 mengatur tentang poligami. Dari syarat-syarat yang ditetapkan tersebut

¹ H.A. Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 2

² Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diketahui bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walaupun demikian, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Dalam pengertian yang umum poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Pada praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga di lain waktu pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Di antara ayat Al-Qur'an yang paling populer membicarakan kasus poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*³

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa poligami merupakan suatu yang diperbolehkan. Namun, kebolehan yang dimaksudkan pada ayat tersebut mempunyai syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami, yaitu berlaku adil. Hal itu dapat diketahui dari alternatif yang ditawarkan Allah yakni apabila ada rasa khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana mengawininya, maka diperbolehkan mengawini wanita lain

³ Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim, 2011), h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

baik dua, tiga ataupun empat, dan jika masih ada kekhawatiran tidak bisa berlaku adil terhadap wanita-wanita lain yang akan dipoligami, maka cukup mengawini satu istri saja. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan pesan melalui ayat tersebut bahwa poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai kemampuan berlaku adil. Karena seyogyanya para suami yang menikahi satu istri lebih menjamin untuk berlaku adil terhadap istrinya dan dapat menjauhkan dari peluang sikap aniaya (tidak adil).

Surat An-Nisa' ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, sehingga mengakibatkan banyak menjadi janda dan anak menjadi yatim. Dari persoalan yang dihadapi, maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.⁴ Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.

Adapun *asbabun nuzul* ayat di atas berdasarkan keterangan Aisyah ra. waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair, anak Asma' binti Abu Bakar (kakak Aisyah), tentang bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara harta anak yatim. Aisyah menjawab: *"Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahnya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur*

⁴ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah Saw*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.⁵

Walaupun jika dilihat dari *asbabun nuzul* nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu *pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak.⁶ *Dan ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu.

Secara historis praktik poligami sudah ada semenjak zaman pra-Islam. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.⁷ Dan hampir semua agama mengakui keberadaan poligami, di

⁵ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* dikutip dari: Fathonah, " Telaah Poligini: Persepektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer," dalam *Studi Keislaman*, Volume 5., No. 1., (2015), h. 18

⁶ Adapun Negara yang pernah melarang poligami secara mutlak adalah Turki dan Tunisia. Lihat Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 194-195

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gremadia Pusta Utama, 2007), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

samping poligami sudah dikenal oleh banyak masyarakat di dunia, juga mempunyai dasar yang jelas dalam ajaran agama masing-masing.

Sehingga tidaklah tepat menuduh bahwa poligami berasal dari budaya Islam, karena praktik poligami sudah ada semenjak pra-Islam. Namun yang perlu diperhatikan adalah pembaharuan jika sekarang ini poligami menjadi masalah kontemporer dalam Islam.

Perbedaan penafsiran terhadap ayat poligami menyebabkan silang pendapat di antaranya mempersoalkan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam poligami, yaitu adil, sebagaimana yang dinukil dari surat An-Nisa' ayat

3. Kalangan tradisionalis beranggapan bahwa adil poligami merupakan perintah dan penekanannya pada syarat untuk berlaku adil yang tertera pada surat An-Nisa' ayat 3, perintah itu adalah kewajiban masing-masing individu yang berpoligami kepada Allah SWT, sementara kalangan modernis berpendapat bahwa teks poligami harus mempertimbangkan syarat mutlak adil yang berlandaskan kemaslahatan.⁸

Syarat adil yang dimaknai pada ayat tersebut bukan sekaligus sebagai anjuran untuk berpoligami, hal itu dapat dilihat pada *asbab-an-nuzul* ayat tersebut.⁹ Untuk menjadi sebuah aturan, pemaknaan adil sebagai syarat poligami haruslah memiliki kajian yang koherensif, sehingga tidak menimbulkan mudharat dalam penerapannya.

⁸ Bani Aziz Utomo, *Konsep Adil dalam Poligami* (E-Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 4

⁹ Siti Musdah Mulia, *Op.Cit.*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan, yakni keadilan etis, merupakan keadilan yang berlandaskan terhadap kebijakan tertinggi yang menentukan perilaku manusia dan keadilan teologis yakni keadilan yang sesuai dengan doktrin yang telah ditetapkan oleh para teolog berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Artinya makna adil harus ditinjau dari semua aspek.¹⁰

Dalam praktik poligami, keadilan dibagi menjadi dua, keadilan secara hukum (*qanun*) yang berarti dalam hal memenuhi kebutuhan materi dan yang kedua keadilan dalam persamaan istri dalam memberikan cinta dan kasih sayang, masalah yang kerap dihadapi oleh keluarga poligami adalah masalah keadilan cinta dan kasih sayang. Sementara manusia tidak mungkin adil dalam melakukan itu, karena keadilan yang demikian sesungguhnya hanya milik Allah SWT semata, manusia hanya sedikit bisa berlaku adil itu pun hanya keadilan materil, dan hal itu sekali pun masih sulit untuk dilakukan.¹¹

Mengenai konsep adil dalam poligami Imam Syafi'i, As-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan di antara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.¹² Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama ahli fiqh paling tidak memiliki dua syarat: *Pertama*, kemampuan dana yang cukup

¹⁰ Zakiyuddin Baidhawry, *Rekontruksi Keadilan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), h. 16

¹¹ Bani Aziz Utomo, *Op.Cit.*, h. 6

¹² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istri dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹³

Muhammad Husein al-Dzahabi¹⁴ mendefenisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas mampu yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan Mustafa al-Siba'i¹⁵ mengatakan bahwa keadilan yang diperlakukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri. Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Muhammad Quraish Sihab juga menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi saja. Sementara dalam hal immateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir. Pendapat ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yakni ketika beliau merasa berdosa tidak mampu berbuat adil kepada istri, dan berdo'a: *Ya Allah, inilah kemampuanku, dan janganlah bebaskan aku kepada sesuatu yang tidak aku mampu*.¹⁶

¹³ Abd. Rahman Do'I, *Penjelasan lengkap Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 192

¹⁴ Muhammad Husein Al-Dzahabi lahir di desa Muthabas pada tanggal 19 Oktober 1915. Ia dikenal sebagai pakar di bidang ilmu-ilmu Al-qu'an.

¹⁵ Merupakan Ulama ahli fikih sekaligus ulama peneliti dan seorang mujtahid yang menguasai Islam dari sumber-sumber terpercaya. Ia lahir di Homs, Suriah pada tahun 1915 M.

¹⁶ Abu Yazid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemperer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 353. Lihat juga kitab Syarah Subulus Salam. اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمِني فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai pandangan konsep adil di atas, semua pendapat cenderung memaknai adil dalam poligami secara kuantitatif yaitu keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Keadilan yang dimaksudkan ialah seperti persamaan dalam memberi nafkah dan pembagian hari bergilir. Artinya keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan yang bisa dicapai oleh usaha manusia.

Berbeda dengan pendapat di atas, Siti Musdah Mulia meninjau keadilan dalam poligami secara kuantitatif¹⁷ dan kualitatif. Pendapat ini dapat dilihat dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami* yang menyatakan bahwa keadilan harus ditinjau dari segala aspek, artinya secara kuantitatif dan kualitatif. Penekanannya adalah mampu berbuat adil secara kualitatif (immateri). Sedangkan praktek poligami yang sering mendasarkan keadilan pada aspek kuantitatif (materi) sebagaimana saat ini menurut Musdah Mulia hanya memperkeruh suasana. Bahkan, dalam pandangannya harus ditolak kalau tidak mau disebut digugat. Keadilan kuantitatif sangat mudah dilakukan, karena diukur dari segi materi. Namun, keadilan kualitatif menjadi makna utama dalam kajian poligami. Menurut Musdah suami yang berpoligami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istrinya, terutama dalam bidang immateri (kualitatif), meski ia sudah berusaha seoptimal mungkin. Dan menurutnya hanya Nabi SAW. yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak.¹⁸

¹⁷ Keadilan sebagai syarat poligami pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sedangkan keadilan kualitatif adalah keadilan yang menekankan pada rasa cinta dan kasih sayang.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Op.Cit.*, h. 111-112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu pentingnya, syarat adil ini, Nabi SAW. sampai menegaskan ancaman bagi para suami yang tidak adil dalam berpoligami. Ancaman Nabi itu terbaca dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi SAW. bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ¹⁹

Artinya: *Barang siapa yang mempunyai dua istri, lalu berat sebelah kepada salah satunya, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya miring.*

Sambung Musdah lagi, surat An-Nisa' ayat 129 menyatakan bahwa suami tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya kendatipun dia ingin melakukannya. Artinya, Islam sudah menutup pintu poligami melalui ayat tersebut.²⁰

Perbedaan dalam memahami makna adil sebagai syarat poligami ini berimplikasi pada kesimpulan hukum yang dihasilkannya. Siti Musdah berpandangan bahwa poligami adalah *haram lighoirih* (haram karena aksesnya). Dalam menguatkan kesimpulan hukum ini, Musdah juga meninjau poligami dengan *az-zari'ah*. Ia melihat pada fakta sosial bahwa poligami lebih menimbulkan aspek negatif dibandingkan dengan aspek positifnya.

Pandangan konsep adil dalam poligami menurut Siti Musdah Mulia di atas, menarik untuk dikaji. Karena Siti Musdah Mulia mempunyai pandangan yang berbeda dengan konsep adil para ulama pada umumnya, yang mayoritas berpandangan bahwa syarat adil dalam poligami hanya menyangkut materi

¹⁹ Imam Al-Hafiz Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulaimi Al-Tirmidzi (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darul Ghihorb Al-Islami, 1996), Jilid 3, h. 439

²⁰ *ibid*, h. 130-131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(kuantitatif), seperti adil dalam nafkah dan mabit (giliran bermalam). Lantas bagaimana keadilan poligami yang dimaksudkan oleh Musdah Mulia? Dan mengapa ia mensyaratkan keadilan poligami harus secara materi dan immateri, sehingga melahirkan kesimpulan hukum *haram lighairihi*?

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan analisis dan mengkaji lebih dalam mengenai konsep adil yang dikemukakan Siti Musdah Mulia dalam bukunya Islam Menggugat Poligami. Untuk itu, penulis mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Konsep Adil dalam Poligami (Suatu Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam buku Islam Menggugat Poligami)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis sampaikan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan **“Konsep Adil dalam Poligami Menurut Siti Musdah Mulia.”**

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis paparkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang konsep adil dalam poligami ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami konsep adil dalam poligami menurut Siti Musdah Mulia.
- b. Untuk mengetahui analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang konsep adil dalam poligami.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media perbandingan dalam khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga, khususnya yang berkaitan dengan sistem perkawinan poligami.
- c. Untuk menambah khazanah ilmu bagi mahasiswa dan masyarakat Islam.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.

3. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian ini adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu Konsep Adil dalam Poligami menurut Siti Musdah Mulia.

4. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan maka digunakan data yang dibedakan dalam:

a. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang langsung diperoleh dari buku yang terkait dengan tema penelitian.²¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku Siti Musdah Mulia yang berjudul *Islam Menggugat Poligami*.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau diambil dari beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yaitu *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasinya*, terjemahan kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dan literatur lainnya.

²¹. Tantang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-3, h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yang dalam hal ini data tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Ilmiah, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum Islam, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data, dari buku, catatan-catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analisis. Kerja dari metode deskriptif analisis adalah dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²² Metode deskriptif analisis ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan dasar istinbath hukum Siti Musdah Mulia. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Siti Musdah Mulia tentang konsep adil dalam poligami.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²² Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Prakttek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51

- a. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.²³
- b. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

Bab *pertama*: pendahuluan, bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua*: bab ini mendeskripsikan biografi Siti Musdah Mulia yang meliputi: riwayat hidup, pendidikan dan latar belakang intelektual, aktivitas-aktivitas dan karya-karyanya serta dasar-dasar istinbath hukumnya.

Bab *ketiga*: tinjauan umum keadilan dan poligami, bab ini membahas tinjauan umum tentang teori keadilan yang meliputi: pengertian keadilan, keadilan dalam persepektif barat, dan keadilan persepektif Islam. Kemudian teori poligami yang meliputi: pengertian poligami, sejarah poligami, hukum

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yatasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36

²⁴ Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 20070, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami, syarat-syarat poligami, alasan-alasan poligami dan hikmah poligami.

Bab *keempat*: bab ini menjelaskan tentang konsep adil dalam poligami menurut Siti Musdah Mulia dan analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai konsep adil dalam poligami.

Bab *kelima*: merupakan bab terakhir sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA

A. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia

Si kerudung putih dari selatan adalah julukan yang diberikan teman dekatnya; Marwan Saridjo kepada Siti Musdah Mulia saat duduk di SMA Datumuseng dan menjadi bintang dengan kerudung putihnya.²⁵ Nama lengkap Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A, APU. Nama yang diberikan orang tuanya selengkapnyanya adalah Siti Musdah Mulia, namun ketika masuk SMP nama depan “siti” dihilangkan karena waktu itu terasa *ndeso* (orang desa). Ada perasaan menyesal ketika telah dewasa karena sering terjadi orang yang belum mengenalnya menulis namanya pada surat undangan dengan menyebut “bapak”, karena menganggap nama itu adalah nama seorang laki-laki. Walaupun hal itu dialaminya, Musdah tidak pernah menyalahkan orang yang berbuat seperti itu karena dari namanya sendiri tidak terlihat unsur yang memastikan bahwa penyandang nama tersebut adalah seorang perempuan. Sedangkan panggilannya sehari-hari di lingkungan keluarga biasa dipanggil Mulia.

Lahir di Bone, suatu kota yang terletak di teluk Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret 1958. Musdah merupakan anak pertama dari enam bersaudara, pasangan H.Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad serta

²⁵ Marwan Saridjo, *Cak Nur: Di Antara Sarung dan Ddasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab (Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri dari Ahmad Thib Raya²⁶, Guru besar Pascasarjana UIN Jakarta. Ibu Musdah merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare Pare. Sedangkan ayahnya pernah menjadi komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Jika ditelusuri lebih ke atas, silsilah keluarganya sangat terkenal dengan kehidupan agama. Kakek dari ayahnya H. Abdul Fatah adalah seorang mursyid ternama di jama'ah Tarekat Khalwatiyah.²⁷

Bone hanyalah tempat kelahiran, sejak umur 2 tahun Musdah Mulia dibawa oleh kedua orang tuanya untuk hijrah ke Jawa, tepatnya di kota Surabaya. Mereka tinggal di pemukiman elit dekat asrama Angkatan Laut di sekitaran Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun berselang yaitu tahun 1960-1967, mereka pun akhirnya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang kumuh yaitu di kelurahan Kalibaru, Tanjung Priuk. Di wilayah itu banyak dihuni oleh kaum nelayan miskin karena jeratan tengkulak. Musdah Mulia menyaksikan di tempat itu anak-anak tidak bersekolah dengan baik karena harus membantu orang tuanya mencari ikan di laut. Sama halnya dengan kondisi masyarakatnya, mereka terbiasa dengan meminum minuman keras dan perkelahian antar sesama. Penjaja seks pun amat mudah dijumpai di

²⁶ Pada 1984, Siti Musdah Mulia menikah dengan Ahmad Thib Raya. Ahmad Thib Raya merupakan putra tertua pasangan dari K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Bertemu dengan Ahmad ketika sama-sama menjadi mahasiswa, ia adalah kakak seniornya di Fakultas Adab.

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan islami Meraih Ridho Ilahi*, (Bandung : Marja, 2011), h. 345

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudut-sudut jalan dan rumah-rumah sangat tidak teratur. Umumnya mereka tidak berpendidikan dan anak-anak perempuan paling tinggi hanya tamatan SD lalu dikawinkan.²⁸

Keadaan sosial di wilayah yang ditempati Musdah Mulia amatlah sangat memprihatinkan sehingga meninggalkan bekas yang amat mendalam bagi Musdah. Sehingga ia bertekad untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya pada perempuan. Ketika kakeknya melihat kondisi lingkungannya tidak baik, maka kakeknya pun menyarankan kepada ibunya untuk segera kembali ke kampung dengan pertimbangan agar anak-anak tidak terkontaminasi pengaruh negatif dari lingkungan mereka. Atas saran dari kakeknya tersebut, Musdah Mulia pun kembali ke daerah asalnya dulu, Bone.²⁹

B. Riwayat Pendidikan dan Latar Belakang Intelektual Siti Musdah Mulia

Pendidikan Formal Musdah Mulia dimulai dari SD Negeri Surabaya. Namun pertengahan kelas 4 pindah ke Jakarta dan masuk SD Negeri Koja, Jakarta Utara. Di sekolah ini ia mendapat guru kelas yang sangat perhatian kepadanya dan membimbingnya dengan penuh kasih sayang yang bernama bapak Soetomo. Selain mendorong aktif belajar, guru ini juga mendorong aktif diberbagai kegiatan lomba, misalnya ia pernah diikutkan dalam kegiatan “Musabaqah Tilawatil Qur’an” tingkat anak-anak se-Jakarta Utara. Waktu itu ia tahu bahwa dirinya gagal menjadi pemenang. Tetapi pak Soetomo memberikan bingkisan hadiah kepadanya sambil mengatakan “*kamu menang*”

²⁸ *Ibid.*, h. 346

²⁹ *Ibid.*, h. 347

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagai hadiahnya terimalah ini”. Dua tahun ia belajar dan selalu terpilih menjadi “*Murid Teladan*”.³⁰

Pada kelas 6 Musdah pindah ke SD Kosambi, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala sekolahnya seorang perempuan yang memiliki karakter yang tegas, perkasa dan disiplin serta ditakuti oleh semua murid. Profil kepala sekolahnya itu secara tidak langsung menjadi idola bagi Musdah Mulia. Setelah tamat SD pada tahun 1969, dia masuk Madrasah Tsanawiyah di Pondok As’adiyah Sengkang, ibukota kabupaten Wajo. Setelah tamat PGA As’adiyah pada tahun 1973 ia ikut kakek dan neneknya pindah ke Makassar dan melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makassar (tamat 1974).

Sayang sekali niatnya untuk melanjutkan ke IAIN Makasar terhambat, Karena harus pindahkan ke Sengkang. Dan akhirnya Musdah melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam As’adiyah dan memilih Fakultas Usuluddin (teologi). Selain di Usuluddin, ia pun ikut kuliah di Fakultas Syari’ah (Hukum Islam) (1977). Menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (1980); Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makasar (1982); Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syahid, Jakarta (1992); dan Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid, Jakarta (1997).³¹

³⁰ *Ibid.*, h. 347

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, *Op.Cit.*, h. 201-202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musdah Mulia menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah : *Al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai Keislaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin Effendi, seorang novelis ternama di Makassar yang novel-novelnya banyak mengungkapkan nilai-nilai religius. Pada tahun 1982 risalah itu diikuti pada kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa IAIN se-Indonesia yang diadakan Departemen Agama dan ternyata masuk dalam kategori 10 karya ilmiah terbaik mahasiswa IAIN se-Indonesia, dan untuk prestasi ini Musdah mendapatkan hadiah berupa tabanas senilai Rp. 250.000,- suatu jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran pada masa itu.³²

Sarjana lengkapnya diraih tahun 1982 dengan judul skripsi : *Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said* (Aspek-aspek keislaman dalam novel-novel Titi Said). Selama kuliah di S1 Musdah merasa hanya bayar kuliah sendiri, selebihnya dibayar dengan beasiswa dari Yayasan Supersemar. Delapan tahun kemudian yaitu tepatnya pada tahun 1990, barulah Musdah kembali ke kampus, tepatnya pada Program S2 bidang Sejarah Pemikiran Islam Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992). Tepat dua tahun (1992) program S2 ia rampungkan, demikian pula suaminya. Keduanya pun melanjutkan ke program S3. Hanya saja, Musdah masih harus menghadapi sejumlah tugas penelitian di Kantor, berbeda dengan suaminya yang mendapatkan tugas belajar penuh sehingga tidak ada beban sama sekali, Musdah tetap harus aktif di Kantor melaksanakan tugas-tugas penelitian,

³² ABN Nasution, *Biografi Siti Musdah Mulia*. Repository.uinsu.ac.id. Diunduh tanggal 12 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun tidak harus datang setiap hari sebagaimana layaknya pegawai Negeri.

Musdah mempunyai pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di S3 yaitu ketika ia memenangkan undian sebagai petugas TPHI (Tim Pembimbing Haji Indonesia). Ceritanya, Pak Munawir Syazali sebagai Menteri Agama ketika itu, adalah dosen di program S3 untuk mata kuliah fiqh siyasah (Pemikiran politik Islam). Beliau punya tradisi memberikan kesempatan kepada mahasiswanya yang telah merampungkan mata kuliahnya untuk menjadi TPHI. Berhubung jatah menteri terbatas untuk dua orang, maka dibuatlah undian. Dan akhirnya terpilih lah Musdah Mulia sebagai salah seorang pemenang dari undian tersebut. Yang menjadi persoalan pada saat itu adalah bahwa TPHI hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja. Sehingga bapak Dirjen Haji menelpon bapak menteri untuk mengkonfirmasi hal itu dan dijawab bahwa Siti Musdah Mulia berangkat haji dengan menggunakan fasilitas Tamu Menteri yang berangkat dengan rombongan khusus.

Musdah sangat tertarik dengan mata kuliah fiqh siyasah (pemikiran politik Islam), hal itu dilatarbelakangi keinginannya untuk mendalami seluk-beluk wacana politik Islam, misalnya bagaimana pandangan Islam tentang politik, sebab di matanya politisi sering kali tampil dalam sosok yang kurang mengindahkan nilai-nilai moral, mereka saling sikut dan saling menjatuhkan. Bagi mereka berlaku prinsip: *“tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan”*. Kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok diatas segala-galanya. Ketekunannya dalam mata kuliah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuahkan hasil, untuk dua semester ia memperoleh nilai 95 (A plus). Pada akhir perkuliahan S3, setiap mahasiswa wajib mempresentasikan draf disertasi masing-masing. Musdah mengambil judul: Negara Islam dalam Pemikiran Husain Haikal. Mengingat tokoh Husain Haikal berasal dari Mesir, data-data yang lengkap mengenai dirinya harus ditelusuri di Mesir, tepatnya di Kairo.

Demikianlah, pada tahun 1994 bersama suami ia mendapat kesempatan melakukan penelitian disertasi ke Kairo. Di sana ia meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana pemikiran politik Islam, khususnya tentang pemikiran politik Husain Haikal (1888-1956), seorang negarawan Mesir yang amat terkemuka. Sang suami meneliti tentang pemikiran Az-Zamakhasyari, seorang mufassir (ahli tafsir) dan ahli sastra terkenal di dunia Islam pada abad ke-11. Kemudahan Musdah mengakses berbagai data di negeri itu, antara lain berkat jasa baik Munawir Syazali yang membekali dirinya dengan data dengan beberapa surat rekomendasi untuk tokoh-tokoh penting di Mesir, termasuk Ahmad Haikal, putra bungsu Husain Haikal. Tokoh inilah yang memperkenalkan Musdah kepada sejumlah informan kunci dalam penelitiannya, seperti Dr. Aziz Syaraf, Redaktur Bahasa Al-Ahram, surat kabar paling terkemuka di Mesir.

Penelitian dan kajiannya terhadap pemikiran politik Islam, antara lain menyimpulkan bahwa dasar-dasar sistem politik Islam mengacu kepada nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan (*al-adl*), perasaan (*al-musawat*), persaudaraan (*al-ikhaa'*), kebebasan (*al-huriyyah*), toleransi (*al-tasamuh*), dan perdamaian (*al-salam*). Adapun kondisinya dan apapun alasannya, kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemaslahatan umat haruslah merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Islam amat mengancam perilaku despotik dan tiranik serta mengutuk semua bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan.

Tiga tahun setelah kembali dari Kairo, tepatnya Kamis, 27 Maret 1997 Musdah mempertahankan disertasinya dengan judul: *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* di hadapan Sidang Tim Penguji dalam ujian promosi yang diketuai oleh Rektor IAIN Syahid, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA dengan penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Harun Nasution, Prof. Dr. Munawir Syazali, Dr. Johan Meuleman, Prof. Dr. Mulyanto Sumardi, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin dan Dr. Muslim Nasution, dan dinyatakan lulus dengan predikat amat baik.

Empat bulan berikutnya, Sabtu, 26 Juli 1997 ia diwisuda dengan memperoleh penghargaan doktor teladan IAIN Syarif Hidayatullah untuk tahun ajaran 1996/1997. Sementara sang suami lulus pada tahun berikutnya. Ternyata, ia mampu menyelesaikan studi lebih cepat daripada suaminya, padahal beban yang diembannya jauh lebih berat.

Musadah Mulia merupakan doktor ke-117 yang dihasilkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi dalam urutan perempuan yang mencapai doktor di IAIN tersebut ia baru urutan ke-4. Artinya dari 117 doktor yang dihasilkan IAIN Syahid Jakarta selama 15 tahun sejak berdirinya (1982-1997), hanya ada empat perempuan. Dalam bidang studi Sejarah dan Pemikiran Politik Islam ia merupakan doktor perempuan pertama.³³

³³ Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Iddah*, (Fakultas Syariah IAIN Waki Songo Semarang, 2006), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Adapun pendidikan non-formal yang pernah diikuti Musdah antara lain: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).³⁴ Visiting Profesor di EHESS, Paris, Prancis (2006); Internasional Leadership Visitor Program, USA, Washington (2007).³⁵

Musdah Mulia adalah perempuan Muslim pemikir kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksi metodologis bagaimana menafsirkan Al-Qur'an untuk menghasilkan interpretasi yang sensitif gender dan berkeadilan. Dengan gagasan yang kritis dengan semangat liberalisme dan berkeadilan. Tentu banyak faktor yang melatar belakangi pemikiran Musdah Mulia, tidak terlepas dari semangat feminisme yang menginginkan liberalisme dan keadilan. Semangat zaman berupa pembaharuan, konsep kesetaraan dan keadilan gender, dan adanya kebijakan toleransi untuk kekerasan terhadap perempuan.

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. XII-XIV

³⁵ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang Selatan : PT Bentara Aksara Cahaya, 2020) h. vi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikiran beliau tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup dan bersosialisasi, sehingga berpengaruh pada pola pikir dan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Di antaranya:

1. Ruang Lingkup Keluarga

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh bagi dinamika dan perkembangan pertumbuhan anak-anaknya. Pola pikir orang tua sangat mempengaruhi bagaimana perilaku anaknya. Begitu pula lingkungan keluarga yang dimiliki Musdah mengantarkan dan memiliki gagasan untuk membuktikan suatu kebenaran tentang apa yang ia peroleh sejak dini.

Musdah Mulia hidup dan dibesarkan dari lingkungan keluarga yang sangat kental dan taat dengan tradisi Islam. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare, sedang ayahnya seorang aktivis organisasi Islam yang kemudian dikenal sebagai organisasi Islam fundamentalis. Ia bahkan menjadi salah satu pimpinan yang disegani dalam negara Islam versi Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Kakeknya, K.H Abdul Fattah, adalah seorang mursyid ternama di dalam Tarekat Khalwatiyah Naqshabandiyah. Bahkan pamannya K.H. Muhammadong melanjutkan kekhalifahan (kepemimpinan) di organisasi tersebut. Sementara kakek dari ibunya adalah seorang ulama NU tradisional. Kakeknya lulusan Makkah, menguasai kitab klasik. Pandangan keislamannya pun sangat konservatif dan sangat tradisional. Tradisi NU sangat kental di dalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika menggambarkan masa kanak-kanaknya, ia bercerita bahwa ia tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Orang tuanya juga tidak mengijinkannya bersahabat dengan non-muslim. Kalau ia tetap melakukannya, mereka memerintahkan ia untuk segera mandi. Namun setelah dewasa, Musdah pernah melancong ke negara-negara muslim lainnya dan menyadari bahwa Islam memiliki banyak wajah. Kemudian ia berkata: “ini membuka mata saya”. Sebagian yang diajarkan kakek dan ulama memang benar, tapi lainnya adalah mitologi. Saat SMA Musdah Mulia sudah menunjukkan dirinya sebagai aktivis. Beliau bergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Dan dilanjutkan ke perguruan tinggi yang memperkenalkan dirinya dengan ide-ide baru sehingga beliau mampu memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa.³⁶

2. Pendidikan

Pendidikan salah satu kunci membuka mata para penuntut ilmu. Penalaran kritis juga khazanah keilmuan yang dimiliki Musdah Mulia cukup luas sehingga beliau mampu merekonstruksi terhadap teks yang bias gender. Bagi Musdah pendidikan sangat berpengaruh dan berperan penting bagi dinamika kehidupan. Pendidikan mampu merubah kehidupan yang gelap menjadi terang.

Memiliki kesempatan mengenyam pendidikan ketingkat yang tinggi mengantarkan pola pikir dan cara pandang Musdah Mulia untuk lebih mengangkat harkat dan martabat perempuan yang selama ini perempuan di

³⁶ Hendri Saputra, “*Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*” (Tesis: IAIN Bengkulu, 2015), h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggap kelas nomor sekian oleh kaum patriarki. Bagi Musdah perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk berkiprah diruang manapun selagi tidak melanggar syariat. Karena, perempuan dan laki-laki adalah sama yang membedakan tingkat ketaqwaannya yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13. Untuk itu prinsip keadilan harus benar-benar ditegakkan.

Bagi Musdah keterbelakangan perempuan disebabkan karena pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah mengakibatkan termarjinalkannya para kaum perempuan. Dipaksa menikah pada usia dini tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi hingga akhirnya perempuan hanya menjadi pelengkap dirumah tangganya. Tekat dan niat yang betul-betul dimiliki Musdah untuk merubah image masyarakat muslim yang selalu dipersepsikan sebagai umat yang miskin, bodoh dan terbelakang. Dari 84 negara di dunia yang pernah dikunjungi oleh Musdah, dan 24 negara Islam rata-rata perempuan khususnya tidak berpendidikan tinggi. Dari situlah muncul keinginan untuk mendorong perempuan berpendidikan tinggi dan aktif membangun masyarakat dan tetap berakhlak karimah.³⁷

Menurut Musdah, perlu merevisi pendidikan agama yang terlalu menekankan pada aspek kognitif semata, dan merumuskan suatu sistem pendidikan agama yang dapat mengubah perilaku keagamaan seseorang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan peduli pada persoalan sekitarnya dan berguna bagi sesamanya.³⁸

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis.. Op.Cit.*, h. 212

³⁸ *Ibid.*, h. 270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Realitas Sosial

Kebanyakan feminis hidup dalam lingkungan yang patriarkhis. Mereka menyadari ada pola budaya relasasi yang ternyata tidak menguntungkan perempuan. Kesadaran tersebut terpengaruh dalam membentuk wacana feminisme di kalangan para mufassir feminis tersebut. Yang akhirnya sangat berpengaruh dalam upaya memahami ayat-ayat keagamaan berdasarkan pandangan hidup mereka.

Dalam memahami teks spiritual terhadap teks-teks keagamaan, para feminis muslim menggunakan instrumen yang berbeda dari apa yang digunakan oleh para mufassir klasik. Sehingga para feminis kontemporer menghasilkan gagasan tentang posisi laki-laki dan perempuan yang egaliter dan berkeadilan dari sudut pandang universal.³⁹

4. Perkembangan Global

Teknologi informasi yang berkembang demikian pesat menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu kompleks dalam kehidupan umat Islam. Pergolakan “emansipasi” dan “demokrasi” di berbagai bagian wilayah dunia dapat dengan begitu mudah diakses umat Islam dan ini sangat berpengaruh pada kehidupannya. Perubahan sosial akibat globalisasi menyebabkan pemikiran-pemikiran keislaman klasik mulai mengalami “keterasingan” karena memang dalam hal-hal tertentu tidak mampu menjawab persoalan yang terus berkembang akibat perubahan tersebut. Munculnya fenomena-fenomena baru yang menjadi tantangan tersebut mengharuskan para pemikir

³⁹ Hendri Saputra, *Op.Cit.*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontemporer muslim termasuk para feminis untuk mencoba menggulirkan wacana baru sebagai respon perkembangan dan perubahan karena globalisasi.⁴⁰

5. Benang Merah

Pemikiran Amina Wadud, Fatima Mernissi, Musdah Mulia terdapat “Benang Merah”, atau persamaan, terutama dalam ide penafsiran kembali atas ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Nabi yang ditafsirkan dari perspektif pengalaman dan visi kaum laki-laki dan berimplikasi luas terhadap kedudukan kaum perempuan.

Dalam buku Muslimah Reformis, Musdah juga mengutip pendapat Wadud, bahwa pernyataan “laki-laki *qawwamuna* atas perempuan, tidak dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat secara otomatis pada setiap laki-laki, melainkan hanya bersifat fungsional. Yakni selama bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur’an dalam hal memiliki kelebihan dan memberi nafkah.

Musdah juga mengutip pendapat Fatimma Mernissi yang mengemukakan analisis historis yang sangat kritis terhadap muatan politis periwayatan beberapa diantaranya hadis yang diriwayatkan Abu Bakhras, yang menolak kepemimpinan perempuan. Seperti penilaiannya terhadap Abu Hurairah, Mernissi juga mengungkapkan cacat pribadi Abu Bakhras, yakni beliau pernah terlibat kesaksian palsu.⁴¹

⁴⁰ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* Alih Bahasa oleh: Farid Wajidi (Yogyakarta: LSPPA, 1994), h. 3

⁴¹ Marwan Saridjo, *Op.Cit.*, h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlihat benang merah, pemikiran Musdah Mulia setidaknya di pengaruhi oleh tokoh feminis kontemporer seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi. Keduanya adalah tokoh feminis di dunia muslim yang melakukan rekontruksi terhadap teks-teks yang dianggap memojokkan atau merendahkan kaum perempuan. Dengan kegigihan melakukan rekontruksi ulang terhadap teks, mereka mampu menemukan titik yang dimaksud oleh mereka. Kemudian gagasan yang dikeluarkan para feminis⁴² muslim banyak mempengaruhi pola pikir feminis lain yang menganggap pernyataan itu benar.

Musdah Mulia salah satu feminis Muslim di Indonesia yang juga melakukan rekontruksi terhadap keadaan teks yang merendahkan perempuan atau bias gender. Dengan mengambil referensi dari pemikiran-pemikiran feminis seperti Wadud dan Mernissi, kemudian Musdah Mulia melakukan rekontruksi sendiri terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadist dan berhasil menuangkan gagasan bahwa perempuan juga bisa berkiprah di ranah publik tak hanya laki-laki. Perempuan adalah makhluk setara dengan laki-laki yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya.⁴³

Pemikiran Musdah Mulia juga sangat kentara dipengaruhi oleh gerakan postmoderisme. Ia mengaku dalam hal keagamaan banyak dipengaruhi dan menaruh hormat pada pemikiran Harun Nasution dan Nurcholish Madjid.

⁴² Tokoh Feminis yaitu orang yang sadar tentang adanya ketidakadilan yang menimpa sebagian penduduk dunia dan senantiasa berjuang untuk menghapuskan ketidakadilan itu, tidak peduli orang itu wanita atau pria, asal memenuhi kategori itu, maka dia adalah feminis. Lihat buku Sofyan Abdurrahman P. Kau, *Fikih Alternatif*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), h. 182

⁴³ Hendri Saputra, *Op.Cit.*, h. 74

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal gender Musdah mengaku banyak dipengaruhi oleh Feminis Muslim, selain itu juga dipengaruhi Nawal Sadawi, Abdullahi an-Na'im dan Qasim Amin.⁴⁴

C. Aktivitas-aktivitas dan Karya-karya Siti Musdah Mulia

Musdah Mulia mempunyai karir yang cukup gemilang, perjalanannya sebagai peneliti sangat lancar. Kenaikan pangkat fungsional penelitiannya berjalan mulus, bahkan lebih cepat dari yang biasa diraih oleh umumnya peneliti, pada saat instansi pemerintah yaitu hanya 9 tahun. Dia juga perempuan pertama dikukukuhkan LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan di Kementrian Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: *Potret Perempuan dalam Lektur Agama (Rekontruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis*.⁴⁵

Musdah Mulia memulai karir menjadi Dosen Tidak tetap di IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1982-1989 dan di Universitas Muslim Indonesia, Makassar pada tahun 1982-1989; Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makassar pada tahun 1985- 1989, peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta pada tahun 1990-1999; Dosen Fakultas Adab IAIN Syahid, Jakatra tahun 1992-1997, dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta pada tahun 1997-1999; Direktur Perguruan Al-Wathaniyah Pusat, Jakarta pada tahun 1997-2015, dosen Pascasarjana UIN

⁴⁴ Eka Suriyansih, *Merombak Struktur*, "Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)", dalam *Studi Agama dan Masyarakat*. Volume 13., No. 2., (2017), h. 300

⁴⁵ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis.. Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 1997- sekarang; Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Jakarta pada tahun 1999-2000, Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang pencegahan diskriminasi dan Perlindungan Minoritas pada tahun 2000-2001, Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI pada tahun 2000-2001; Staf ahli Menteri Agama RI Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional pada Tahun 2001.⁴⁶

Sebagai keluarga Nahdlyyin, Musdah ikut berperan aktif di Organisasi IPPNU dan PMII. Setelah hijrah ke Jakarta dan menjadi tokoh wanita, ia juga ikut aktif dalam berbagai organisasi level nasional dan internasional, sebagaimana yang terlihat dibawah ini :

1. Dilingkungan ICRP (Indonesia Conferense Religion and Peace) ia telah dikenal luas menjabat sebagai Sekjen Organisasi sejak tahun 1998;
2. Dia pun pernah menjadi ketua Forum Pemuka Agama mengenai kekerasan terhadap kaum perempuan. Dalam majelis al-Alami lil-alimat al-Muslimat Indonesia (MAAI) selama beberapa tahun (2001-2003) ia duduk sebagai salah seorang ketua;
3. Dalam lembaga kajian Agama dan Gender ia duduk sebagai direktornya (1998). Ia juga menjadi ketua Komunitas Agama Islam Indonesia;
4. Dilingkungan organisasi NU, ia berturut-turut duduk dalam pengurus Fatayat NU (sebagai Sekjen), dan di PP Muslimat NU, menjabat sebagai wakil sekjen tahun 2002-2004;

⁴⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami. Op.Cit*, h. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Kedudukan lain yang ia geluti adalah di LSM. Dia anggota Forum Komunikasi Umat Beragama dan Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (KPMID) dan Ketua Ikatan Dewan Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang;

6. Ia pun telah malang melintang menghadiri berbagai pertemuan, seminar dan konferensi internasional tentang perempuan dan di sejumlah mancanegara seperti Amerika, Eropa, Asia, Afrika dan lain-lain.⁴⁷

Sebagai akademisi dan peneliti yang produktif, Musdah Mulia memiliki karya-karya yang sangat kritis dan vokal menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan berupa keadilan, demokrasi, pluralisme dan kesetaraan gender. Sejumlah penghargaan nasional dan Internasional diraihnya, antara lain: *Internasional Women of Courage Award* (2007) dari pemerintah Amerika Serikat atas kegigihannya memperjuangkan demokrasi; *Yap Thiam Hein Human Right Award* (2008) karena aktif membela kelompok rentan dan minoritas di Indonesia; *Plangi Tribute to Women* dari kantor Berita Antara (2009) karena aktivitasnya dalam penguatan literasi masyarakat; *International of The Year* (2009), dari pemerintah Italia, atas kiprahnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. NABIL Award (2012), karena vokal menyuarakan prinsip kebangsaan dan kebebasan beragama. Tahun 2013 menerima Penghargaan dari Himpunan Indonesia untuk Ilmu-Ilmu Sosial sebagai ilmuwan yang melahirkan karya-larya yang berpengaruh dalam bidang

⁴⁷ Marwan Saridjo, *Op.Cit.*, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu Sosial di Indonesia. Berikutnya penghargaan *The Ambassador of Global Harmony* (2014) dari Anand Ashram Foundation karena memperjuangkan kebhinnekaan dan pluralisme. Humanity Award (2019) dari Internasional Forum For Face and Human Rights atas kiprahnya merajut perdamaian melalui penegakan HAM di Indonesia.⁴⁸

Adapun Karya-karya Musdah Mulia antara lain :

1. Mufradat Populer (1980);
2. Pangkal Penguasa Bahasa Arab (1989);
3. Ensiklopedi Islam (1993);
4. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (1995);
5. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995);
6. Negara Islam : Pemikiran Politik Haikal (1997);
7. Ensiklopedi Islam (1997);
8. Lektur Agama Dalam Media Massa (1999);
9. Anotasi Buku Islam Kontemporer (2000);
10. Poligami dalam Pandangan Islam (2000);
11. Pedoman Dakwah Muballighot (2000);
12. Meretas Jalan Hidup Manusia: Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi (2000);
13. Ensiklopedi Al-Qur'an (2000);
14. Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) (2001)
15. Analisis Kebijakan Publik (2002);
16. Untukmu Ibu Tercinta (2002);

⁴⁸ Musdah Mulia, *Ensiklopedi Muslimah Reformis.. Op.Cit.*, h. vii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Seluk Beluk Ibadah dalam Islam (2002);
18. Islam Menggugat Poligami (2004);
19. Perempuan dalam Politik (2004);
20. Muslimah Reformis : Perempuan Pembaharu Keagamaan (2005);
21. Violence Againsts Women (2006);
22. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (2007);
23. Poligami: Budaya Bisu yang merendahkan Martabat Perempuan (2007);
24. Menuju Kemandirian Politik Perempuan (2008);
25. Islam dan Hak Asasi Manusia (2010);
26. Muslimah Sejati : Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi (2011)
27. Membangun Surga di Bumi (2011)
28. Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas (2011)
29. Karakter Manusia Indonesia (2013);
30. Kemuliaan Perempuan dalam Islam (2014);
31. Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksualitas Manusia (2015);
32. 9 Jurus Menjadi orang tua Bijak: Mengasuh dengan Hati dalam Pendidikan Karakter (2015);⁴⁹
33. Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi (2019).⁵⁰

⁴⁹ Ulum, Biografi Musdah Mulia: Dalam buku Muslim Sejati, www.mujahidahmuslimah.org, diakses 22 Januari 2021

⁵⁰ Musdah Mulia, *Ensiklopedi Muslimah Reformis.. Loc.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya yang berjudul *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaharu Keagamaan*, yang oleh Kompas, judul itu disebutnya cukup provokatif. Dr. Musdah Mulia telah memaparkan secara lugas persoalan-persoalan pokok tentang perempuan, termasuk “kegetiran” nasib makhluk yang lemah itu yang menurutnya selalu terpinggirkan, dan salah satu sebab peminggiran itu sebagai implikasi dari salah satu interpretasi atas teks-teks agama. Karena itu sebagai salah satu solusi untuk menghilangkan kegetiran yang timbul dari interpretasi yang salah itu, menurut Musdah perlu dilakukan pembacaan ulang dan reinterpretasi atau teks-teks agama, Al-Qur’an maupun sunnah Rasulullah SAW.⁵¹

Selanjutnya ia juga menulis tentang : Tataran Sosial dan Kehidupan Modern, tauhid tidak sekedar doktrin keagamaan yang statis. Dia adalah energi aktif yang membuat manusia mampu menempatkan tuhan sebagai tuhan, dan manusia sebagai manusia. Penjiwaan terhadap makna tauhid tidak saja membawa kemaslahatan dan keselamatan individual, melainkan juga melahirkan tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari diskriminasi, ketidakadilan, kezhaliman, rasa taat dan sebagainya.⁵²

Dalam masyarakat kita terdapat kelompok yang dinamakan kaum *mustadh’afin*. Menurut Musdah Mulia di antara kelompok masyarakat *mustadh’afin* (yang direndahkan, teraniaya dan terlemahkan secara struktural dan sistemik) yang paling untung dengan kehadiran Islam adalah perempuan.

⁵¹ Marwan Saridjo, *Op.Cit.*, h. 71

⁵² *Ibid.*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan penghargaan kepada kaum perempuan. Dalam Al-Qur'an disebutkan Aisyah binti Muzalim, istri Fir'aun sebagai seorang perempuan yang menduduki derajat tinggi di mata Allah dan manusia. Ia sebagai simbol perempuan yang teguh memegang keyakinannya, dan tidak terpengaruh oleh gemerlap kekuasaan suaminya (yang zalim).⁵³

Pada masa Rasulullah perempuan yang mencapai derajat ketaqwaan yang tinggi tidak sedikit, seperti Sumayyah, muslimah pertama yang mati syahid, Khadijah binti Khawalid (istri Rasulullah dan perempuan pertama yang percaya kepada kenabian Muhammad) dan Rasulullah juga tidak pernah ragu untuk menjadikan Ummul Mukminin Aisyah, sebagai penyambung lidah bagi kaum perempuan, karena beliau (Rasulullah) mengakui kecerdasan dan keteguhannya dalam beragama.⁵⁴

Dewasa ini agama Islam terutama oleh dunia barat sering dituduh sebagai sumber masalah, masalah berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan atau yang sering disebut dengan ketidakadilan gender (Gender Inequality).

Dalam bukunya Islam Menggugat Poligami, Musdah menuturkan bahwa selama berabad-abad perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berda di bawah superioritas kaum laki-laki. Mereka dianggap tidak penting dan sekedar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Kultur dan persepsi itu akhirnya menepatkan perempuan

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*, h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dalam ranah domestik dan laki-laki dalam ranah publik. Tidak heran bila pemahaman sempit ini melahirkan berbagai bentuk penindasan, pelecehan seksual, dan tindak kekerasan lainnya terhadap perempuan.

Salah satu faktor yang turut mengesahkan hal di atas adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual. Oleh karena itu, salah satu proyek penting dari gerakan penyadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender ini adalah dilakukannya dekonstruksi pengkajian ulang dan reinterpretasi terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual melalui penerbitan buku-buku tafsir, hadis, fiqih, dan literatur lain yang bersepektif gender.⁵⁵

Dalam konteks Indonesia, khusus untuk bidang agama, kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, menurut Musdah Mulia ada dua masalah utama. *Pertama*, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang berkaitan dengan peran dan fungsi perempuan. *Kedua*, masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peran perempuan.⁵⁶

Pemahaman agama dan interpretasi teks-teks keagamaan yang bias gender, dan kemudian membawa implikasi kepada ketimpangan gender, pertama-tama secara mencolok nampak pada tiga hal⁵⁷:

⁵⁵ Lihat buku Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* pada bagian sampul buku.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid.*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. Adam AS adalah manusia pertama, dan isterinya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dengan demikian perempuan adalah subordinat dari laki-laki. Dia manusia kelas dua (*the second human being*).
2. Kejatuhan Adam AS dan Hawa dari surga akibat godaan Hawa yang terpengaruh oleh bisikan iblis. Implikasi dari pemahaman tersebut, perempuan itu pada hakikatnya makhluk penggoda dan dekat dengan iblis.
3. Dikalangan masyarakat perempuan dipersepsikan bahwa perempuan tidak layak jadi pemimpin, karena tubuhnya sangat lembut dan lemah serta akalunya pendek. Persepsi itu muncul akibat pemahaman terhadap firman Allah SWT yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁵⁸

Ada beberapa pendapat Musdah Mulia `yang dikritik oleh beberapa pihak atau lembaga di antaranya:

1. Pernikahan lintas agama

Munculnya masalah ini ke permukaan setelah terbitnya buku Fikih Lintas Agama (FLA) yang disusun oleh Nurcholish Madjid dkk, disusun kemudian dengan munculnya buku Counter Legal Draft Kompilasi Hukum

⁵⁸ Depatemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (CLD KHI) yang disusun oleh Tim LKAJ Departemen Agama RI yang dipelopori juga oleh Siti Musdah Mulia.

Dalam “kitab hukumnya” mereka membolehkan wanita muslimah dinikahi oleh lelaki Ahli Kitab, dengan alasan tidak ada larangan yang sharih (jelas dan tegas). Yang ada justru hadits yang tidak begitu jelas kedudukannya. Selain itu mereka juga menggunakan metode historis kontekstual dalam penafsiran Al Quran yang berdampak serius pada syariat Islam.⁵⁹

Mereka juga mengajukan beberapa argumen untuk menguatkan pendapatnya tersebut antara lain :

- a. Pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang yang akan bersama-Nya di surga nanti. Bahkan Tuhan secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan lainnya saling mengenal. Dan pernikahan antar agama dapat dijadikan salah satu ruang, dimana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.
- b. Bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun cinta kasih (al mawaddah) dan tali sayang (ar rahmah). Di tengah rentannya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan

⁵⁹ Nurcholish Madjid, *Fikih Lintas Agama*, (Jakarta: Pramadina, 2004), h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian.

- c. Semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Al-Qur'an sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik, lalu membuka jalan bagi pernikahan dengan ahli kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan secara evolutif. Dan pada saatnya, kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas kedua, dan bukan pula ahli dzimmah dalam arti menekan mereka, melainkan sebagai warga negara.⁶⁰

Secara garis besar pandangan para ulama mengenai pernikahan lintas agama terpola dalam tiga pendapat . *Pertama*, melarang secara mutlak pernikahan antara muslim dan non muslim, baik yang dikategorikan musyrik atau ahlul kitab. Larangan itu berlaku baik bagi perempuan muslim maupun laki-laki muslim. *Kedua*, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim dengan syarat perempuan non muslim itu dari kelompok ahlul kitab, tetapi tidak sebaliknya. *Ketiga*, sebagian ulama membolehkan pernikahan antara muslim dan non muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan.⁶¹

⁶⁰ Rifka Shahira, "Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam", (Skripsi : UIN SUSKA Riau, 2018), h. 29

⁶¹ Siti Musdah Mulia, *Op.Cit.*, h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Musdah, termasuk pengikut pendapat ketiga. Dia mempertanyakan fatwa MUI Pusat⁶² yang mengharamkan semua bentuk pernikahan lintas agama, termasuk pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim walaupun dari kalangan ahlul kitab. Alasan MUI karena kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan dari pernikahan lintas agama itu lebih besar daripada kebaikan (maslahah) yang didatangkannya, terutama bagi kaum muslimin. Kaidah fikih yang dipakai MUI adalah :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat (maslahat)”⁶³

Berbeda dengan MUI Pusat, MUI DKI, berpendapat pernikahan lintas agama hukumnya boleh (tidak haram). Pendapat MUI DKI itu menurut Musdah bersandar pada pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dan beberapa ulama India dan Pakistan.⁶⁴

Berdasarkan pada data dari MUI DKI, sejak April 1985 hingga 10 Juli 1986, terdapat 239 kasus perkawinan lintas agama atau perkawinan campuran antara pemeluk agama. 117 diantaranya adalah perkawinan pasangan laki-laki nonmuslim dan perempuan muslim. Berdasarkan “fatwa” MUI DKI itu (30 September 1986), Kantor Urusan Agama (KUA) dibolehkan melangsungkan pernikahan antara laki-laki muslim dan

⁶² Fatwa MUI, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 (Tentang Perkawinan) tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama.

⁶³ *ibid.*,

⁶⁴ Siti Musdah Mulia, *Op.Cit.*, h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan “ahlul kitab”, dan juga Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta dibolehkan melayani dan mencatatkan pernikahan lintas agama.⁶⁵

2. Halal Menikah Sesama Jenis

Selain kebolehan pernikahan lintas agama, Musdah Mulia juga memberikan argumennya tentang kehalalan menikah dengan sesama jenis. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Musdah dari berbagai sumber dalam sebuah makalah ringkasnya yang berjudul “Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta”, dosen Pascasarjana UIN Jakarta ini menulis:

Menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang given atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat kontruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima. (Sumber: Majalah Tabligh DTDK PP Muhammadiyah, 2008)

Musdah Mulia memang sangat berani dalam menyuarakan pendapatnya, meskipun sangat kontroversial dan mengejutkan banyak orang. Dia tentu paham bahwa isu homoseksual dan lesbian adalah hal yang sangat kontroversial, bahkan dilingkungan aktivis liberal sendiri. Banyak orang yang berpendapat agenda pengesahan perkawinan sejenis ini ditunda dulu, karena waktunya masih belum tepat. Tapi, Musdah tampaknya bersikukuh dengan pendapatnya. Ia tetap bersuara tentang kehalalan dan keabsahan perkawinan sesama jenis. Tidak heran jika pada 7 Maret 2007

⁶⁵ *Ibid.*, h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerintah Amerika Serikat menganugerahinya sebuah penghargaan “International Women of Courage Award”.⁶⁶

3. Pembentukan CLD-KHI yang Kontroversial

Kontroversi ini mulai dari peluncuran pertama CLD-KHI pada tanggal 4 Oktober 2004 di Jakarta. HM Taher Azhari (UI Jakarta) dan Hasanuddin AF (MUI) sebagai orang resource menyatakan penolakan theri untuk CLD-KHI pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa CLD-KHI tidak mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah. Hasanudin berpendapat bahwa "CLD-KHI disusun berdasarkan sentimen dari tim." Sementara Azhari menyatakan bahwa anggota tim "memanfaatkan akal dan mengabaikan wahyu. CLD-KHI lebih sekuler daripada BW (Burgerlijk Wetboek, kode hukum swasta di periode Kolonial Belanda) karena mengukur validitas pernikahan berdasarkan urusan pribadi dan annules sisinya ibadah. Dia berpendapat bahwa ada empat aspek yang dapat diterima. *Pertama*, CLD-KHI mengusulkan hak perempuan untuk rekonsiliasi. Ini berarti bahwa rekonsiliasi bukan hanya hak suami. *Seccond*, berkabung periode setelah pemakaman (ihdâd) tidak hanya diterapkan pada istri, tetapi juga untuk suami. *Ketiga*, nusyuz tidak hanya milik istri, tetapi juga untuk suami. *Keempat*, anak haram memiliki hak untuk inherite harta / ayah kandungnya nya.⁶⁷

⁶⁶ Rifka Shahira, *Op.Cit.*, h. 31

⁶⁷ Syifaurrehman, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia*, <https://santrikafi.blogspot.co.id/2015/05/counter-legaldraft-kompilasi-hukum.html>, diunduh 5 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam naskah CLD-KHI, Siti Musdah Mulia mengajukan saran-saran penyempurnaan atas Kompilasi Hukum Islam, yang telah disahkan menjadi ketentuan normatif melalui instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Beberapa materi yang disarankan untuk dimasukkan dalam revisi Kompilasi Hukum Islam (termuat dalam CLD-KHI) yaitu :

- 1) Wali bukan rukun nikah;
- 2) Mahar tidak saja diberikan kepada calon isteri tetapi juga kepada calon suami (yang diberikan oleh calon isterinya);
- 3) Hak cerai dan rujuk suami dan isteri sama-sama punya hak untuk menceraikan dan merujuk;
- 4) Iddah berlaku untuk isteri dan suami;
- 5) Suami juga bisa divonis nusyuz, sehingga isteri terbebas dari kewajibannya terhadap suami;
- 6) Kawin kontrak atau kawin mut'ah hukumnya boleh;
- 7) Ihdad (masa berkabung setelah pasangan meninggal) berlaku pada isteri dan suami;
- 8) Kawin beda agama, beda agama bukan penghalang dalam proses perkawinan;
- 9) Anak diluar perkawinan bila ayah biologisnya diketahui anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologis itu;
- 10) Pembagian waris, hak untuk laki-laki sama banyaknya dengan anak perempuan;
- 11) Orang berbeda agama boleh saling memberi dan menerima wakaf.

Usul-usul perubahan atas Kompilasi Hukum Islam terutama yang menyangkut hal-hal yang dikutip di atas telah menimbulkan kontroversi dan sikap pro kontra dalam masyarakat.⁶⁸

D. Dasar-dasar Istinbath Hukum Siti Musdah Mulia

1. Al-Qur'an dan Hadist

Musdah meyakini bahwa nilai yang diajarkan Islam tergambar dalam teks-teks Al-Qur' dan hadits adalah nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan.⁶⁹ Meskipun Al-Qur'an dan hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan sosial manusia. Meski pembaruan harus tetap mengacu pada Al-Qur'an dan hadist, akan tetapi pemahamannya tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan nonliteral atau kontekstual teks dengan mengacu pada tujuan hakikat syariat (maqashid al-syariah).⁷⁰

3. Maqashid Syariah

Musdah menuturkan aturan yang bersifat hukum yang dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadist belum sebanding dengan jumlah persoalan yang dihadapi umat. Sehingga walaupun pembaruan harus tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits. Namun pemahamannya tidak semata didasarkan

⁶⁸ *Ibid.*, h. 99

⁶⁹ lihat Situs.Mujahidahmuslimah. com

⁷⁰ Hendri Saputra, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", dalam *Manthiq* Vol. 1, No. 2, (2016), h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu pada tujuan hakikat syariat (Maqashid Syariah). Musdah mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali yang merumuskan lima prinsip dasar yang mencerminkan Maqashid Syariah yang disebutnya Al-Huquq Al-Khamsah. Kelima hak asasi ini dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti dan hak reproduksi.⁷¹

4. Prinsip Relativitas Fiqh.

Musdah menyatakan, meskipun Al- Qur'an adalah kebenaran yang abadi, namun penafsirannya tidaklah abadi. Penafsiran selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab merupakan bukti positif relativitas fiqh. Perlu dipahami bahwa seorang faqih atau mufassir, seobjektif apapun dia, dia akan sulit melepaskan diri dari pengaruh budaya, hukum dan tradisi yang berkembang pada masa atau lingkungan dimana dia hidup.⁷²

5. Prinsip Tafsir Tematik

Musdah Mulia mengungkapkan, pola tafsir tematik menggunakan tiga pendekatan. *Pertama*, menekankan pentingnya memahami arti bahasa kata-kata Al-Qur'an (Lexical Meaning of Any Qur'anic Word). *Kedua*, menyelidiki serta menyeleksi semua ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas. *Ketiga*, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa Al-Qur'an harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks

⁷¹ *Ibid.*, h. 133-134

⁷² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus dan yang turun dalam konteks yang lebih umum.

Dengan kata lain, sebuah penafsiran harus dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.⁷³



⁷³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 172-174

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TEORI KEADILAN DAN POLIGAMI

A. Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adil” adalah merupakan sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak pada salah satunya, atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban.⁷⁴ Maka dengan demikian, keadilan adalah merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kedudukan dan nilai yang sama sebagai manusia. Akan tetapi, perlu ditekankan juga bahwa pada masalah-masalah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, terkadang diperlukakan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa yang disebut sebagai suatu keadilan.

2. Teori Keadilan Persepektif Barat

Berawal dari pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nichomachean Ethics*. Buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya

⁷⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁷⁵ Hal penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Persamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Selanjutnya berangkat dari pemikiran Jhon Rawls. Jhon Rawls merupakan salah satu filsuf berpengaruh yang mendobrak kebuntuan filsafat politik di paruh kedua abad ke-20. Dalam teorinya, Rawls menjelaskan ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*. *Pertama*, ditekankan pentingnya posisi asali. Posisi asali tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Di antara bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan semacam dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Rawls mengasumsikan bahwa pihak-pihak dalam

⁷⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi asali tidak mengetahui konsepsi tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis.⁷⁶ Kedua, adanya konstitusi, undang-undang atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati. Jhon Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama, dengan kata lain keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi setiap masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi suatu masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Namun, Rawls menambahkan, walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata secara baik (*well ordered society*). Menurutinya, keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu, betapapun pentingnya keadilan formal, Rawls tidak ingin berhenti pada taraf ini. Ia menyeberangi formalisme ini dengan merumuskan sebuah teori keadilan yang lebih memberi tempat kepada kepentingan semua pihak yang terjangkau kebijakan publik tertentu. Untuk itu Rawls percaya bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair.⁷⁷

⁷⁶ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Alih bahasa oleh: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 13

⁷⁷ *Ibid*, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemahaman Rawls tersebut bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian semestinya. Orang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada semua hukum dapat dianggap sebagai adil.⁷⁸

3. Teori Keadilan Persepektif Islam

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia dimanapun dan kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu Islam bermisi rahmatan li al-‘alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Menepatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.⁷⁹

Dari segi bahasa Arab, kata adil mengandung banyak arti antara lain: *al-musawah* (sama), *al-i'tidal* (lurus/ peretengahan), dan *al-maiyl ila al-haq* (condong pada yang benar).⁸⁰ Karena sikapnya yang lurus dan sama, tidak berat sebelah pada salah satu pihak, maka ia berarti melakukan sesuatu yang benar. Jadi orang yang adil, kata Quarish Shihab adalah orang yang sikapnya lurus, selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan

⁷⁸ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.t), h. 156

⁷⁹ Noordjannah Djohantini, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban kekerasan Demi Keadilan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), cet. Ke-I, H. 28

⁸⁰ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, dikutip dari Yusefri, “ Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)” dalam *Ilmu Syariah*, Vol. 3., No. 2., (2015), h. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.⁸¹

Murtadha Muthahhari dalam bukunya mengutip beberapa pendapat ulama mengenai makna adil yang diantaranya: menurut al-Baydhawai kata ‘adl berarti “berada dipertengahan dan mempersamakan”. Sedangkan menurut al-Raghib al-Asfahani, kata adil dalam arti *al-musawah* (sama) dipakai untuk dua sekaligus, yaitu “digunakan untuk sesuatu yang dapat dilihat” dan “digunakan untuk sesuatu yang diketahui dengan non materi/perasaan”. Ada juga yang mengatakan ‘adil adalah penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya.⁸²

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur’an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktifitas kehidupannya. Adil merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعْدِلُونَ ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,*

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 148

⁸² Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Alih bahasa oleh: Agus Efendi, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1981), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸³

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan dan penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam berifat universal dan komprehensif, seperti disyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁸⁴

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.⁸⁵

⁸³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 109

⁸⁴ *Ibid.*, h. 278

⁸⁵ *Ibid.*, h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Dengan demikian, Al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaannya, hal ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa' ayat 1 dan surah Ar-Rum ayat 21. Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dan surah An-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara dalam beriman, beribadah dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat pada surah Al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar ma'ruf nahi mungkar dalam surah At-Taubah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, hal ini dapat dilihat dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Kesemua ayat tersebut memberikan panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia.⁸⁶

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), cet. Ke-I, H. 27

B. Teori Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa greek (Yunani), yang terdiri dari dua kata, yaitu *polus* dan *games*. *Polus* berarti banyak, sedangkan *games* berarti perkawinan, yang mana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang dalam satu waktu.⁸⁷ Pengertian tersebut senada dengan definisi yang dikemukakan oleh WJS. Poerwadarminta yang menyebutkan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari satu.⁸⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama, maupun sebaliknya, yakni poliadri, dimana seorang wanita memiliki atau mengawini sekian banyak laki-laki.⁸⁹ Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan seorang suami dengan dua orang istri atau lebih.⁹⁰

⁸⁷ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Baru Van Hoave, 1984), h. 3736

⁸⁸ WJS. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 354

⁸⁹ Depdiknas, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. Ke-III, h. 904

⁹⁰ Pius A. Partano dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), h. 606

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ajaran Islam, istilah poligami diambil dari bahasa Arab “*ta’addud az-zawjat*” yang artinya beristri banyak lebih dari satu. Para sarjana hukum Islam telah sepakat mengatakan bahwa poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.⁹¹ Namun batasan umumnya yang dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan istri.⁹²

Secara terminologis, Siti Musdah Mulia mendefenisikan poligami suatu ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.⁹³ Dengan singkat Moch. Anwar menegaskan poligami adalah bersistri lebih dari satu.⁹⁴

Bertengger dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian itu disebutkan “salah satu pihak”, namun yang dimaksud poligami di sini adalah ikatan perkawinan, seorang suami dengan beberapa orang istri (dalam Islam dibatasi empat orang istri)

⁹¹ Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 40

⁹² Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat An-Nisa’ (4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. lihat Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 84

⁹³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, *Op.Cit.*, h. 43

⁹⁴ Moch. Anwar, *Fiqh Islam; Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980), h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, tidak disebut poligami seorang laki-laki beristri lebih dari satu, tetapi sebelumnya melangsungkan akad nikah kedua, terlebih dahulu istri diceraikannya. Begitu pun, tidak disebut poligami mana kala seorang perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu (poliadri⁹⁵).

2. Sejarah Poligami

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum agama Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada masa itu cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW. nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang laki-laki. Maka seorang laki-laki boleh saja kawin dengan sekehendak hatinya. Poligami juga berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, sebuah riwayat menjelaskan

⁹⁵ Poliadri selain dilarang dalam Islam, di berbagai penjuru dunia pun tidak banyak dipraktikkan. Praktek poliadri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu, seperti suku Tuda dan suku di Tibet. Lihat Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Ibid, h. 44. Lihat juga Murtadha Mutahhari, *The Rights of Women in Islam*, terj. M. Mashem, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2007), h. 35-36 “Diriwayatkan bahwa sekelompok wanita, sekitar empat puluh orang, berkumpul dan menghadap Ali ra. Lalu mengemukakan pertanyaan kepadanya, “mengapa Islam memperkenankan laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri tapi tidak mengizinkan wanita bersuami lebih dari seorang? Bukankah ini diskriminasi yang tidak adil?” Ali menyuruh mengambil cangkir-cangkir kecil berisi air, dan masing-masing wanita itu diberi secangkir air. Kemudian mereka memasukkan semua air itu ke dalam suatu mangkuk yang besar yang diletakkan di tengah-tengah pertemuan itu. Sesuai permintaan Ali, kelompok wanita itu menumpahkan air mereka ke dalam mangkuk tersebut. Kemudian Ali meminta masing-masing mereka untuk mengisi lagi cangkir mereka dengan air dari mangkuk besar itu, tetapi dengan ketentuan bahwa setiap orang harus mengambil air yang sama yang sebelumnya telah ditumpahkan nya ke dalam mangkuk itu. Mereka semua menanyakan bagaimana hal itu mungkin. Air itu telah bercampur tidak mungkin dipisahkan lagi. Maka berkatalah Ali bahwa apabila seorang wanita mempunyai beberapa suami, dengan sendirinya dia akan mengadakan hubungan seks dengan setiap suaminya itu, dan kemudian ia akan hamil, bagaimanakah, Tanya Ali, wanita itu dapat menentukan ayah anak yang dikandungnya?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perjanjian lama bahwa Daud mempunyai tujuh ratus orang istri serta 300 orang gundik.⁹⁶

Syariat yang dibawa nabi Isa AS. juga tidak melarang poligami. Di dalam Injil Mathius ada permisalan yang diberikan untuk Malukutul A'la melalui lisan al-Masih (Isa AS) yang menunjukkan bahwa ia menyatukan antara lima istri boleh, bahkan menyatukan antara sepuluh orang istri juga boleh.⁹⁷ Sehingga umat Nasrani kuno tidak ada yang menyatakan bahwa poligami tidak diperbolehkan. St. Agustinus pun menyatakan kebolehan poligami. Bahkan di abad IV, Raja Valintinian membuat undang-undang yang mengizinkan seseorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Baru pada masa Raja Yustinian dikeluarkan larangan poligami.⁹⁸

Pada masa pra-Islam, bangsa Arab mempunyai kebiasaan berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan zaman sekarang. Di masa sekarang, poligami terwujud hidup berdampingan lebih dari seorang istri. Mereka juga bebas menceraikan salah satu istrinya jika menghendaki. Tapi dalam masyarakat Arab sebelum Islam tidak dikenal adanya perceraian. Wanita merupakan obyek. Dalam perkawinan itu kaum laki-laki tidak pernah peduli apakah si wanita senang atau tidak dengan perkawinan yang dijalani. Bahkan poligami bagi mereka dapat

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*, Alih bahasa oleh: As'ad Yasin, "Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h. 683

⁹⁷ Khalid al-Juraisi, *Limadza Ta'addud al-Zawjat*, dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 42

⁹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Cet. Ke-9, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkat derajat kaum laki-laki, karena lelaki yang beristri lebih dari satu adalah laki-laki yang memiliki kemampuan secara materil. Karena itu, laki-laki yang beristri lebih dari satu cenderung mendapat penghormatan masyarakat karena kemampuannya dalam masalah materil. Sememntara kaum wanita yang suaminya lebih dari satu merasa bangga dan terhormat karena terangkat kedudukan suaminya.⁹⁹

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira bahwa poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Muhammad Syaltut (w. 1963), ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syariat.¹⁰⁰

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan praktik poligami. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno¹⁰¹. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan

⁹⁹ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syamil, 2007), h. 2

¹⁰⁰ Muhammad Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* dikutip dari: Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 44-45

¹⁰¹ Menurut masyarakat Mesir kuno, poligami tidak bertentangan dengan budi pekerti yang mulia. Adapun yang mendasari pendapat ini adalah adanya undang-undang mereka yang mengatakan: “ Sesungguhnya Tuhan memberi berkah bagi kaum lelaki, karena mereka mempunyai banyak istri dan banyak selir.” Lihat Achmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW.*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2014), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami, malahan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Sejumlah riwayat juga menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang, yakni QS Al-Nisa'(4):3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.¹⁰² Lain halnya dengan Sayyid Sabiq yang memandang bahwa sistem poligami tidak berjalan, kecuali di kalangan bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya, sedangkan pada bangsa-bangsa yang masih primitif sangat jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Hal ini diakui oleh para sarjana sosiologi dan kebudayaan, seperti: Wastermark, Hobbers, Heler dan Jean Bourge.¹⁰³

¹⁰² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Op.Cit., h. 46

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tanpa batas tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal. *Pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Ibnu Naufal Muawiyah. Ia berkata: *“ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat.”* Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: *“Ketika masuk Islam aku punya delapan istri. Aku menyampaikan itu kepada Rasulullah dan beliau berkata: “pilih dari mereka empat orang.”* Riwayat serupa dari Ghailan Ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri, lalu Rasulullah bersabda: *“pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya.”*¹⁰⁴

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami ini sangat berat, dan sebagian kelompok berpendapat hampir dapat dipastikan tidak ada yang dapat memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.

¹⁰⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, Op.Cit.*, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, terlihat bahwa praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya.

Selain dari aspek sejarah, untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat *asbabun nuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mending orang tua mereka.¹⁰⁵

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan di atas, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam

¹⁰⁵ Khairudin Nasution, *Op.Cit.*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri, mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istri lain, yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.¹⁰⁶

Berdasarkan *asbabun nuzul* tersebut, para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 An-Nisa'. Pada ayat 2 surat An-Nisa' ini mengingatkan kepada wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek melalui jalan yang tidak sah. Sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawani anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim untuk menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain.

3. Hukum Poligami

Poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan menentang, pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tiga (3) kelompok, yaitu: *pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung oleh mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami secara ketat dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu.

Dalam Al-Qur'an ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami dan perintah untuk melakukan poligami oleh umat Islam adalah surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Memaknai ayat di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Menurut Imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah (W. 767M/150 H), Imam Malik (W. 795 M/179 H), Imam Syafi'i (W. 820 M/204 H), dan Imam Ahmad bin Hambal (W. 855 M/241 H), sepakat bahwa poligami itu *mubah* (boleh). Menurut mereka seorang suami memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi diperbolehkannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil diantara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para imam di atas juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja, karena itu jauh lebih baik. Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh al-Sarakhsi (W. 1090 M) dalam kitab *al-Mabasut*, bahwa poligami dibolehkan dan seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para istrinya. Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan hadist dari Aisyah ra yang menceritakan perlakuan adil dari Nabi kepada istrinya, ditambah dengan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para istrinya.¹⁰⁸ Ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri, al-Kasani, ulama madzhab Hanafi, menulis tentang kewajiban suami yang berpoligami, yakni berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan ini menjadi hak istri.¹⁰⁹

Para ulama fiqh klasik juga berpendapat, bahwa Allah mengizinkan menikahi empat orang perempuan. Menurut mereka, walaupun diperbolehkan disini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin ditunaikan, yaitu keadilan dalam kasih sayang, perasaan dan cinta, namun selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung ide ini adalah bahwa

¹⁰⁸ Al-Sarakhsi, *Al-Mabasut* dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 44-45

¹⁰⁹ Al-Imam 'Ala ad-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, cet. Ke-I dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nabi sendiri pernah berkata hubungannya dengan ketidakmampuan berbuat adil dalam hal batin.¹¹⁰

Demikian juga pendapat para ulama tafsir, baik al-Thabari yang berpendapat bahwa poligami adalah diperbolehkan selama bisa berlaku adil. Sedangkan ulama yang lain yaitu Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Al-Razi (Al-Jashshash) yang juga intensif mengupas poligami, berpendapat bahwa poligami bersifat *mubah* (boleh). Diperbolehkannya ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri.¹¹¹

Begitu juga Zamakhsyari (W. 1144 M) berpendapat bahwa poligami adalah dibolehkan, bahkan pandangan jumlah perempuan yang boleh dinikahi bagi laki-laki yang berbuat adil, bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan. Dengan menjumlahkan dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan. Hal ini ditolak oleh Al-Qurtubi (W. 1273 M) di dalam kutipan Khoiruddin Nasution, dimana Harist Ibnu Qois yang mempunyai delapan orang istri, ketika masuk Islam Nabi menyuruh memilih empat orang di antara mereka dan menceraikan sisanya. Adapun menurut Syaukani (W. 1834 M) bahwa dengan turunya surat An-Nisa' ayat 3, yakni menghapus kebiasaan orang Arab pra Islam yang menikahi perempuan tanpa batas.¹¹²

¹¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 99

¹¹¹ Al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, t.t), h. 50

¹¹² Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 87-88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan ulama klasik, secara umum dapat dikatakan bahwa ulama pada era modern memperketat diperbolehkannya poligami, bahkan di antara mereka ada yang mengharamkannya, meskipun dibalik keharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Alasan pemikiran modern melarang menikahi perempuan lebih dari satu, atau kalaupun membolehkannya diikuti dengan berbagai syarat yang hampir tidak mungkin terpenuhi oleh suami, yaitu keadilan.

Sayyid Qutub (W. 1966 M) mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.¹¹³

Yusuf al-Qardawi membagi hukum poligami menjadi 3 macam, dengan ketentuan sebagai berikut:¹¹⁴

a. Boleh Berpoligami

Menurut Yusuf Qardhawi, ada 2 keadaan dimana poligami diperbolehkan yaitu: *pertama*, manusia yang kuat keinginannya untuk

¹¹³ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Juz IV*, alih bahasa oleh: As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h. 274-282 (cek ulang)

¹¹⁴ Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*, (Bandung: Pustaka Imran, 2007), h. 177-183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki keturunan, akan tetapi istrinya tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya. *Kedua*, laki-laki yang kuat syahwatnya, akan tetapi istrinya tidak kuat karena sakit atau karena haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainnya, sementara laki-laki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita.

b. Makruh berpoligami

Muslim menikah dengan satu istri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpukkan isi hatinya. Dengan demikian tepatlah suasana sakinah, mawaddah wa rahmah, yang merupakan sendi-sendi kehidupan suami-istri menurut pandangan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama mengatakan "orang yang mempunyai satu istri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, dimakruhkan baginya untuk menikah lagi. Karena hal itu membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram.

c. Haram Berpoligami

Yaitu bagi orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah untuk istrinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil di antara kedua istrinya.

Namun demikian Amer Ali memberi catatan bahwa teori poligami digunakan jika suatu masyarakat yang menuntut adanya situasi yang menghendaki demikian, misalnya jumlah perempuan yang melebihi laki-laki. Dengan ungkapan yang berbeda Fazlur Rahman menyatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebolehan berpoligami merupakan suatu pengecualian karena keadaan tertentu, sebab kenyataannya kebolehan tersebut muncul ketika terjadi perang, dimana banyak anak yatim dan janda yang ditinggal suaminya. Untuk itu ada dua solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an sehubungan dengan poligami. *Pertama*, bahwa poligami yang terbatas hukumnya boleh. *Kedua*, kebolehan berpoligami diatur dengan sebuah moral berupa keadilan. Dengan ini, Al-Qur'an berharap agar suatu masyarakat berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya, demikian Fazlur Rahman.¹¹⁵

Mu'ammal Humaidy juga menyatakan kesimpulan bahwa Islam bukan menciptakan Undang-undang poligami, tetapi hanya mebatasi poligami dengan jumlah tertentu. Al-Qur'an tidak menyuruh poligami, tetapi hanya membolehkannya dengan persyaratan adil. Poligami merupakan solusi dan jaga-jaga (antisipasi), bukan sebaliknya membuat masalah. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan keadaan dimana dan kapan poligami ini dibutuhkan. Dan betapapun jeleknya poligami barangkali masih lebih baik bagi masyarakat, perorangan, mapapun keluarga daripada penggunaan hak secara membabi buta yang tidak diatur dengan ini.¹¹⁶

Sedangkan menurut tokoh kontemporer, Muhamad Syahrur membolehkan poligami dengan menetapkan adanya syarat kuantitas dan kualitasnya. Dari segi kuantitas, batas minimal poligami adalah satu perempuan. Adapun syarat kualitasnya yaitu istri kedua, ketiga dan

¹¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 101-104

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keempat yang boleh dinikahi harus janda yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya.¹¹⁷

Di lain sisi, Muhammad Abduh berpendapat sebaiknya poligami dijauihi dan dihindari, sesuai dengan kaidah usul fikih yang mengatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat (maslahat).”

Karena menurut realita yang ada bahwa poligami lebih menunjukkan dampak negatif daripada dampak positif dan yang banyak menanggung akibatnya adalah kaum wanita dan anak-anak. Meskipun tidak menafikan ayat yang membolehkan poligami, namun ia sangat menentang praktik poligami dalam masyarakat, di samping karena sulit merealisasikan keadilan bagi istri, sangat sulit juga membina masyarakat yang di dalamnya marak praktik poligami, dari sisi lain poligami tidak diyakini dapat menciptakan suasana harmonis, malah sering kali menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak-anak dari masing-masing keluarga.¹¹⁸ Walaupun Abduh menentang praktik poligami, tapi ia tetap membolehkan poligami pada keadaan yang memaksa seperti tidak dapat mengandung.

Pendapat senada disampaikan juga oleh Masjfuk Zuhdi, menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak resiko/*mudharat* daripada

¹¹⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar Ahali, 1990), h. 598-599

¹¹⁸ J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern world*, alih bahasa oleh: Machun Husein, (Surabaya: CV Amar Press, 1991), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat, karena manusia fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu membawa sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Berbeda dengan kehidupan yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri sedang mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratorium, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.¹¹⁹

¹¹⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, dikutip dari: Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-2, h. 130-131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut at-Tahir al-Haddad¹²⁰, An-Nisa' (4): 3 berhubung dengan An-Nisa' (4): 129. Dengan turunnya ayat An-Nisa' (4): 129, poligami mestinya harus dicegah. Konon, dalam ringkasan bukunya yang ditulis dalam bahasa Prancis, al-Haddad juga menulis Ar-Rum (30): 21, sebagai dasar larangan poligami. Maksudnya barangkali, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sementara dalam kenyataannya, poligami mengakibatkan sulit sekali melahirkan kehidupan yang harmonis dan tentram antara suami, istri-istri dan anak-anak, apalagi kalau peninggalan si suami ketika meninggal sangat terbatas, demikian al-Haddad.¹²¹

Sejalan dengan pandangan al-Haddad ini, Habib Bu Ruqaiba (ketika itu presiden Tunisia) menulis dua alasan pokok untuk melarang poligami. *Pertama*, institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat berbudaya. *Kedua*, An-Nisa' (4): 3, menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh poligami kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹²²

¹²⁰ At-Tahir al-Haddad (1899-1935) adalah pemikir modern Tunisia, berasal dari keluarga terpandang yang tinggal di Tunisia. Aslinya berasal dari Qabis, sebuah kota yang terletak di bagian Selatan Tunisia. Pada tahun 1911 masuk Zaitunah Mosque University, semacam al-Azharnya Tunisia, dan mendapat gelar diploma tahun 1920. Lihat Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 60

¹²¹ Al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, alih bahasa oleh: M Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), cet. Ke-4, h. 78-79

¹²² Azni, *Op.Cit.*, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pidato tanggal 10 Agustus 1956 yang disiarkan keseluruh penjuru Tunisia, Habib Bu Ruqaiba menjelaskan larangan poligami adalah satu pembaharuan yang sudah lama menjadi tuntutan. Poligami adalah hal yang tidak mungkin diizinkan pada abad ke-20 dan tidak mungkin dilakukan seorang yang mempunyai pikiran benar. Keluarga adalah tonggak (fondasi) masyarakat, dan keluarga dapat berhasil dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai antara pasangan. Salah satu upaya untuk saling menghormati dan menghargai ini adalah nikah monogami. Karena itu, monogami bukan hanya ingin mengangkat harkat dan mertabat wanita, tetapi, lebih dari itu, untuk menciptakan saling menghargai dan menghormati antara pasangan (suami dan istri) sebagai usaha maksimal untuk melahirkan anak-anak yang baik.¹²³ Akan halnya dengan poligami Nabi Muhammad SAW, menurut al-Haddad, bukan Tasyri' bagi umatnya. Poligami yang beliau lakukan adalah sebelum adanya tahdid (upaya pembatasan jumlah istri yang boleh dinikahi hanya maksimal empat orang).¹²⁴

Dari sisi lain Muhammad Abdul-Rauf berpendapat, poligami Nabi Muhammad harus dilihat dan dipertimbangkan kondisi kapan beliau melakukannya. Ternyata selama 28 tahun dari umur perkawinannya, atau umur 53 tahun, beliau monogami dengan Khadijah. Beliau melakukan poligami sepeninggal Khadijah, dan adanya tuntutan politik dan sosial,

¹²³ *Ibid.*, h. 61-62

¹²⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diikuti juga dengan tuntutan untuk membantu sejumlah penduduk Madinah (ketika itu disebut Yasrib) untuk mencapai ketentraman masyarakat (*civil order*).¹²⁵

Al-Qasimi (W. 1916 M) berpendapat bahwa hanya pria yang istimewa saja yang bisa melakukan poligami secara adil. Sedangkan Al-Maraghi (W. 1952 M) dalam tafsirnya menyebutkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya karena istri mandul, suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu melayaninya, suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai kepentingan keluarga dan jumlah perempuan melebihi dari jumlah laki-laki.¹²⁶

Amina Wadud¹²⁷ berpendapat bahwa ayat poligami, An-Nisa' (4): 3; *pertama*, ayat ini berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim, yakni wali pria yang bertanggungjawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim harus berlaku adil dalam pengelolaan tersebut. Salah satu pemecahan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan tersebut adalah dengan menikahi anak yatim.¹²⁸ *Kedua*,

¹²⁵ *Ibid.*, h. 62-63

¹²⁶ *Ibid.*, h. 90

¹²⁷ Seorang pemikir wanita muslim Amerika, yang menekankan kajiannya pada masalah-masalah wanita, dengan pendekatan hermeneutik. Ia pernah mengajar di Malaysia tentang masalah-masalah yang sama, wanita. Jika ditelusuri Amina adalah seorang tokoh yang sangat gigih memperjuangkan keadilan gender dalam persepektif Islam. Ia berasal dari Nigeria, anak seorang pendeta Kristen, setelah masuk Islam, lalu ia menetap di Libya. Ia pernah mengenyam pendidikan dalam bidang tafsir di Al-Azhar University, Kairo, Mesir.

¹²⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Qur'an*, alih bahasa oleh: Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 111-112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan keadilan, yakni mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para istri.

Kaitan dengan An-Nisa' (4): 129 banyak mufassir modern berkesimpulan bahwa monogami sebagai perkawinan yang disukai Qur'an. Mestinya ihwal saling melengkapi antara suami dan istri, membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan ketentraman, tidak mungkin tercapai jika seorang suami sekaligus ayah membagi cinta kepada lebih anak satu keluarga, demikian Amina.¹²⁹

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa status hukum poligami menurut beberapa ulama klasik dan ulama kontemporer terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dimana para ulama klasik berpendapat bahwa poligami hukumnya boleh dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istri. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer cenderung membatasi kebolehan poligami, dimana suami hanya boleh berpoligami jika dalam keadaan tertentu saja atau disebut juga dalam keadaan darurat, adapun dalam keadaan normal Islam menghendaki monogami. Di samping itu, sebagian ulama kontemporer justru cenderung mengharamkan poligami.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hukum poligami secara garis besar terbagi tiga yaitu: membolehkan poligami, haram poligami dan membolehkan poligami dengan syarat yang ketat.

¹²⁹ *Ibid.*, h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat-syarat Poligami

a. Jumlah Istri dalam Poligami

Jumhur ulama menyatakan bahwa batas maksimal menikahi perempuan adalah empat. Begitu juga pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Katsir (W. 1373 M), Ibnu Majah (W. 887 M) dan hampir semua ulama klasik. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan sampai Sembilan orang, yaitu pendapat dari Madzhab Syi'ah. Sementara golongan Zhahiriyah berpendapat boleh sampai delapan belas. Sedangkan Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang sama dengan mayoritas ulama, yang menyatakan bahwa poligami dibatasi empat saja.

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat “مَثْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ” dalam ayat 3 surat An-Nisa'. Menurut Madzhab Syi'ah, kalimat tersebut menunjukkan penjumlahan, sehingga jika ditambahkan hasilnya adalah Sembilan. Sedangkan menurut Zhahiriyah adalah delapan belas, karena huruf “wawu” dalam kalimat tersebut dimaknai “dikali” sehingga dua kali tiga kali empat. Sedangkann menurut jumhur huruf “wawu” bermakna “au” yang artinya “atau”.¹³⁰ Pendapat ini dikuatkan dengan qarinahnya yaitu hadis Nabi SAW tentang seorang pria bangsa Tsaqif yang masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri. Mengenai hal itu Nabi lantas menyuruh pria itu untuk memilih empat di

¹³⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir: al-Jami' Baina Fanny al-Riwayah wa al-Diroyah*, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t), Jilid I, h. 532

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara sepuluh istrinya. Sabda Nabi SAW riwayat at-Tirmidziy sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الرَّهْزِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Artinya: “Hannad telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ma’mar, dari al-Zuhri, dari Sali bin ‘Abdullah, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Ghailan Ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi SAW. menyuruh untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”¹³¹

b. Dapat Berlaku Adil

Adapun dasar untuk berlaku adil sebagai syarat kbolehkan poligami yang dijadikan para ulama adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 3 dan 129, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

¹³¹ Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah al-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi Jilid 2*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 368

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹³²

Jika dilihat dari kedua ayat di atas, pada ayat 3 surat An-Nisa' menjelaskan kebolehan poligami dengan syarat berlaku adil, namun apabila takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang wanita saja. Sedangkan pada ayat 129, menjelaskan bahwa seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sepintas kedua ayat tersebut kelihatannya bertentangan, di satu sisi An-Nisa' ayat 3 membolehkan poligami dengan syarat adil, sedangkan pada sisi yang lain An-Nisa' ayat 129 menafikan kemampuan berlaku adil. Maka, di sini perlu memahami kedua ayat di atas dengan baik dan benar tentu melalui pemahaman para ulama. Ternyata para ulama juga berbeda dalam memahami konsep adil dalam poligami berdasarkan kedua ayat di atas.

Imam Syafi'i, As-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan di antara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut

¹³² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.¹³³ Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama ahli fiqh paling tidak memiliki dua syarat: *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istri dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹³⁴

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah serta orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih daripada itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Muhammad Husein al-Dzahabi mendefenisikan keadilan poligami sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas mampu yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlakukan dalam poligami adalah keadilan material seperti

¹³³ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*

¹³⁴ Abd. Rahman Do'i, *Op.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.

Menurut Wahbah az-Zuhailly bahwa syariat menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya poligami, diantaranya kesanggupan untuk berlaku adil terhadap para istri. Keadilan yang dimaksud az-Zuhailly adalah keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku adil terhadap istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik dan masa menginap. Namun jika khawatir akan berlaku zalim atau tidak mampu berlaku adil di antara para istri maka cukup memiliki satu istri saja.¹³⁵

Keadilan yang dimaksud sebagai syarat poligami bukanlah sama rata dalam perasaan, cinta dan kecenderungan hati. Karena itu adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, misalnya rasa cinta dan rasa benci. Akan tetapi, rasa takut penguasaan cinta terhadap hati adalah perkara yang sudah diprediksi. Oleh karena itu, syariat mengingatkannya di dalam surat An-Nisa' ayat 129. Ayat tersebut menegaskan syarat adil, serta tidak terjatuh ke dalam penzaliman terhadap istri dengan meninggalkan seorang dari mereka dalam keadaan terkatung-katung. Dia tidak berstatus sebagai seorang istri yang memiliki hak-hak sebagai istri, juga

¹³⁵ Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, alih bahsa oleh: Abdul Hayyie dkk, *Fiqih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), Cet. Ke-1, h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berstatus sebagai perempuan yang diceraikan, demikian az-Zuhaily.¹³⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil di antara istri-istrinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang, maka haram baginya menikahi lebih dari seorang.¹³⁷

Sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi di atas, Sayyid Sabiq pun memaknai adil yang dituntut dalam poligami ialah dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir suami berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak para istri, maka diharamkan poligami.¹³⁸ Dan Sayyid termasuk ulama yang tidak setuju jika syarat keadilan dalam poligami harus dimaknai adil dalam hal cinta dan kasih sayang karena itu di luar kemampuan seseorang.

Ulama fiqh juga berpendapat bahwa adil terhadap istri-istri yang dipoligami, tidak hanya dalam hal makan, minum, pakaian dan tempat

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa oleh: Muammal Hamidy (Singapura: PT Bina Ilmu, 1993), h. 260-261

¹³⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal. Tetapi juga adil dalam menggilir istri-istri, masing-masing istri berapa lama. Jika istri yang satu mendapat satu malam, maka suami juga harus menggilir istri lainnya satu malam. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. (رواه الاربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي ارسله)

Artinya: *Dari Aisyah ra, ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW. selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Dan bersabda: "ya Allah, inilah adalah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki yang tidak aku miliki." (HR. Al-Arba'ah. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. At-tirmidzi menilainya sebagai hadis mursal)¹³⁹*

Namun mengenai hal di atas, para ulama membedakan masa bergilir antara istri baru yang gadis dengan istri baru yang janda. Bagi istri yang dinikahi dalam kondisi gadis atau belum pernah menikah sebelumnya, maka jatah bergilirnya selama tujuh hari. Sedangkan jatah bergilir bagi istri baru yang sudah pernah menikah atau janda, selama tiga hari. Pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. (متفق عليه، واللفظ للبخاري)

¹³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, alih bahasa oleh: Ali Fauzan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 535

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dari Annas ra, ia berkata: “menurut sunnah, apabila seorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya ia berdiam dengannya tujuh hari, kemudian membagi giliran. Apabila dia menikah lagi dengan janda, hendaknya ia diam dengannya selama tiga hari, kemudian membagi giliran.”* (Muttafaq Alaih dan lafaznya menurut Al-Bukhari)¹⁴⁰

Di samping menggilir istri, adil poligami juga berlaku pada saat melakukan bepergian. Untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu orang istri saat ia menghendaki bepergian. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi berikut ini:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Rasulullah SAW apabila hendak bepergian, beliau mengundi antara istri-istrinya, maka siapa undiannya yang keluar, beliau keluar bersamanya.* (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴¹

Berbagai pendapat di atas, para ulama cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Berbeda dengan Muhammad Abduh yang berpandangan bahwa keadilan yang disyaratkan Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta dan perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur'an mengatakan: “ Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka kawinlah satu istri saja..” (QS. An-Nisa (4): 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang

¹⁴⁰ Ibid., h. 537

¹⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah Jilid I*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), h. 618

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusak struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah saling menyayangi antara anggota keluarganya.¹⁴²

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami lebih tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.¹⁴³

Al-Maraghi berpendapat bahwa yang terpenting ialah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun perkara di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan untuk dilaksanakan. Yaitu kemampuan hati untuk membagi kasih sayang yang sama rata kepada setiap istri.

Pendapat Al-Maraghi di atas tidak jauh berbeda dengan ulama tafsir asal Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang memaknai adil dalam

¹⁴² Ali Ahmad Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-fikri, t.t), h. 10-12

¹⁴³ Abdul al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), h. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami dalam hal material saja. Sedangkan keadilan immaterial sebagaimana yang dimaksudkan surat An-Nisa' ayat 129 tidak mungkin tercapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu, suami yang berpoligami dituntut tidak memperturukkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai.¹⁴⁴

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menegaskan “*kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat mengendaki demikian*”. Namun dengan ayat ini pula kelompok yang lain memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri (seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam. Pendapat yang demikian dinyatakan oleh Muhammad Thaha dan Fazlurrahman.

Menurut Muhammad Thaha, keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati. Sedangkan Fazlurrahman berkomentar berkaitan dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 3 yang menganjurkan poligami dengan disertai syarat bahwa suami harus mampu berlaku adil. Ayat ini juga

¹⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti penegasan “*jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, cukuplah hanya dengan seorang istri*”, selanjutnya pada surat An-Nisa’ ayat 129 ditegaskan bahwa kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istimu, walaupun kamu sangat menghendaki demikian. Dengan demikian, menurut Rahman bahwa Al-Qur’an sebenarnya adalah menegakkan monogami, atau menyelamatkan ayat 3 An-Nisa’ dan 129 dari pengertian yang kontradiktif.

Dari berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa sebagian besar ulama memaknai keadilan sebagai syarat dalam perkawinan poligami adalah pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, as-Sarakhasi, al-Kasani, Muhammad Husein al-Dzahabi, Mustafa al-Siab’i, Wahbah az-Zuhaili, Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziri, dan M. Quraish Shihab. Hal ini menjadikan poligami lebih mudah dilakukan atau poligami menjadi sistem perkawinan yang bisa terealisasi di dalam kehidupan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal kualitatif atau dalam bahasa M. Quraish Shihab keadilan Immaterial seperti cinta dan kasih sayang, sebagaimana halnya yang dikemukakan Muhammad Abduh, Muhammad Thaha dan Fazlur Rahman di atas, maka poligami menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT menjanjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”¹⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril as sebagai pedoman hidup manusia merupakan suatu ketentuan yang bisa untuk dijalankan, terlepas ada sebagian manusia yang menganggap berat atas ketentuan hukum tersebut.

c. Mampu Memberikan Nafkah

Secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri ataupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas perkawinan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:¹⁴⁶

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menyediakan fasilitas perkawinan, maka hendaklah dia kawin..”

Wahbah az-Zuhailly menjelaskan bahwa kemampuan memberikan nafkah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang yang ingin berpoligami.

¹⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 50

¹⁴⁶ Wahbah az-Zuhailly, *Op.Cit.*, h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pandangan ulama yang telah disebutkan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa seseorang yang akan berpoligami harus memenuhi syarat di antaranya: jumlah istri maksimal empat orang, mampu berlaku adil, dalam hal ini yang dimaksud dengan adil poligami ialah adil dalam hal yang bersifat material dan terukur. Selanjutnya, mampu memberikan nafkah, hal ini wajib dipertimbangkan bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami karena dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dewasa ini muncul berbagai seruan baru yang melarang praktik poligami, sebagaimana halnya dengan negara Turki yang mendasarkan UU Sipil tahun 1926, poligami sama sekali dilarang dan apabila terjadi, maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Di Tunisia, berdasarkan UU tahun 1956 yang telah diubah dengan UU tentang Status Pribadi tahun 1981, larangan poligami itu lebih tegas lagi. Pasal 18 UU itu menyatakan bahwa laki-laki yang melakukan poligami dihukum kurungan selama setahun dan denda sebesar 240.000 Frank. Tunisia berpendapat bahwa poligami tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an sendiri. Walaupun semua aturan pembatasan dan pelanggaran poligami tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, namun, itu diberlakukan untuk melindungi hak-hak wanita.¹⁴⁷

Sedangkan di negara Islam lainnya, umumnya kecenderungannya adalah membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu bervariasi

¹⁴⁷ Atho Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh)*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), cet. Ke-III, h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuknya dari cara yang paling lunak sampai yang paling tegas. Di Libanon, berdasarkan hukum keluarga yang diberlakukan kerajaan Turki Usmani pada tahun 1917, poligami tidak dilarang tetapi diharapkan menerapkan prinsip keadilan kepada para istri. Di Maroko, berdasarkan UU Status Pribadi tahun 1958 juga demikian halnya.¹⁴⁸

Cara lain bagi pembatasan poligami ialah dengan pembuatan perjanjian. Istri diberi hak untuk meminta suami ketika melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian bahwa jika ia ternyata nanti nikah lagi dengan wanita lain, maka si istri dapat langsung meminta cerai kepada pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu pihak suami. Hal ini disebutkan misalnya dalam pasal 19 Hukum Keluarga Yordania no. 6 tahun 1976 yang diubah dengan UU Status Pribadi Maroko tahun 1958.¹⁴⁹

Di Pakistan poligami hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin dari istri pertama dan Dewan Hakam (arbitrasi) yang dibentuk untuk menyelidiki hal itu. Bagi pelanggarnya, atas pengaduan dapat dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda 5000 Rupees atau keduanya.¹⁵⁰

Berbagai bentuk kebijakan di atas bertujuan untuk menegaskan terwujudnya apa yang disyaratkan oleh syariat akan kebolehan poligami.

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 214

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 215

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu keadilan di antara para istri, serta kemampuan untuk memberikan nafkah. Karena manusia, terutama orang-orang awam telah mempergunakan dengan buruk pembolehan poligami yang diizinkan untuk tujuan kemanusiaan yang mulia. Selain itu, memperketat kemungkinan poligami tersebut juga bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan status wanita.¹⁵¹

Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI sebagaimana yang berlaku di Indonesia, ternyata juga mengatur tentang syarat poligami. Menurut ketentuan pasal UU Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak ada kabar dari istrinya selama

¹⁵¹ Azni, *Op.Cit.*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.” Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 56:¹⁵²

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menyatakan: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

¹⁵² Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 58 KHI menyatakan:

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974:
 - a. Adanya persetujuan Istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dan pada Pasal 59 KHI menerangkan: “dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin tidak beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami adapat mengajukan banding atau kasasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam persepektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi ini sejalan dengan kaidah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat (maslahat)."*

Kendatipun demikian, hukum kebolehan poligami hanyalah sebagai alternatif dan terbatas sampai empat orang istri. Sebagaimana ditegaskan dalam KHI pasal 55. Dan pembatasan poligami maksimal empat orang dalam waktu bersamaan juga tidak terlepas dari sabda Nabi SAW.¹⁵³

5. Alasan-alasan Berpoligami

Menurut Achmad Kuzari, kalau mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami ini dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh

¹⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Granfindo Persada, 1998), cet. Ke-III, h. 176-177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi sebagaimana dikatakan oleh Lee Kuan Yew, yang waktu itu Perdana Menteri Singapura. Motif-motif yang lainnya, seperti misalnya Rasulullah SAW, berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menengkan ajaran beliau.¹⁵⁴

Abu Azzam Abdillah menulis dalam bukunya yang berjudul “Agar Suami Tak Berpoligami”, bahwa alasan biologis¹⁵⁵ bisa menjadi penyebab dilakukannya praktek poligami. Alasan biologis yang dimaksudkan Azzam Abdillah, antara lain:

a. Istri yang Sakit

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya.

b. Hasrat Seksual yang Tinggi

Sebagian kaum pria memiliki geirah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.

c. Rutinitas Alami setiap Wanita

Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi

¹⁵⁴ Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan dikutip dari: Aa Sofyan, “Analsis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami”, dalam *Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No.1., (2016), h. 10

¹⁵⁵ Abu Azzam Abdullah, *Agar Suami Tak Berpoligami*, (Bandung: Ikomatuddin Press, 2007), h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, beberapa hari saja istrinya mengalami rutinitas tersebut, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami menjadi pilihannya.

d. Masa Subur Pria Lebih Lama

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita. Pernyataan senada disampaikan oleh Ali Ahmad al- Jarjawi bahwa seorang laki-laki akan tetap mampu memproduksi walaupun ia telah berusia lanjut, bahkan pada usianya kedelapan puluh tahun. Di lain sisi terungkap bahwasanya seorang wanita bila telah mencapai usia lima puluh atau lima puluh lima tahun, maka pada umumnya ia akan mengalami masa menopause.

Rahmat Gakim juga menambahkan bahwa faktor sosial menjadi alasan untuk berpoligami. Adapun faktor sosial yang dimaksudkan Rahmat Gakim, sebagai berikut:

a. Kemampuan Ekonomi

Inilah salah satu faktor poligami yang sering terjadi pada kalangan masyarakat modern sekarang ini, kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, seiring menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

b. Banyaknya Jumlah Wanita

Ada saatnya dalam satu tempat jumlah wanita melebihi laki-laki, hal tersebut terjadi akibat terjadinya perang dan banyak laki-laki menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban, akibatnya jumlah wanita lebih banyak sedangkan jumlah laki-laki berkurang, hal ini merupakan masalah yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah wanita adalah masalah sosial yang perlu mendapat perhatian sekaligus pemecahannya. Bentuk pemecahan dari masalah tersebut adalah dengan berpoligami.¹⁵⁶

Demikianlah contoh alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami itu, jika penulis simpulkan maka terdapat faktor-faktor yang kerap dijadikan alasan untuk berpoligami yaitu, faktor biologis, faktor internal rumah tangga seperti kemandulan istri, istri yang lemah dan sikap buruk istri, dan faktor sosial (kemampuan ekonomi dan banyaknya jumlah wanita).

Dengan memperhatikan konteks ayat 3 surat An-Nisa' yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan pengecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan normal, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri dalam Al-Qur'an dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

Namun, untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar masalah mursal, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak sampai menutup sama

¹⁵⁶ Rahmad Gakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekali pintu poligami. Dalam konteks Indonesia yang mempunyai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 3, 4 dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan dengan syarat mendapat izin istri/istri-istri yang tedahulu, mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil.

6. Hikmah Poligami

Islam membolehkan poligami bertujuan untuk suatu kemaslahatan yang timbul akibat kondisi kehidupan. Berpoligami bukanlah suatu yang wajib dan juga bukan suatu yang disunnahkan sebagaimana anggapan sebagian orang, akan tetapi oleh Islam dibolehkan. Kebolehan poligami bukanlah suatu pembolehkan yang tanpa makna atau hikmah. Walaupun hikmah hakikinya hanya Allah yang tahu, namun para ulama fiqh mencoba untuk mencari tahu dan menuliskan dalam kitab fiqh mereka apa-apa hikmah yang terkandung dalam kebolehan poligami, misalnya Sayyid Sabiq dalam kitabnya berpendapat bahwa poligami mempunyai banyak hikmah, di antaranya:¹⁵⁷

- a. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membatasi sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, akan tetapi dengan syarat sanggup berlaku adil terhadap mereka dalam urusan belanja, tempat tinggal seperti yang telah diterangkan di atas.

¹⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 179-185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bilamana ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan.

- b. Adakalanya istri mandul atau menderita sakit yang tidak ada harapan sembuh, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami istri, padahal suami ingin memiliki anak dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Oleh karena itu, ketika dalam keadaan seperti ini melakukan poligami dianggap sebagai cara yang bisa ditempuh, akan tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memperbanyak populasi umat Islam karena umat Islam tidak akan bangkit dengan menyebarkan risalah ini kecuali jika mereka kuat, memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara, seperti tentara, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta menjaga kewibawaan dan kekuatan Negara tersebut.
- d. Mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ketimpangan jumlah ini terpaksa memperbolehkan poligami demi melindungi dan mengayomi populasi perempuan yang ada. Jika poligami tidak diberlakukan, maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan pada perbuatan nista yang dapat merusak tatanan sosial dan meruntuhkan moral.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang istri maupun ketika istri memasuki masa menopause. Karena perempuan tidak bisa diajak melakukan hubungan badan ketika mengalami haid, yang biasa membutuhkan sampai sepuluh hari dan ini berlaku setiap bulan, ketika melahirkan dan mengalami nifas, dimana dia membutuhkan waktu hingga mencapai empat puluh hari.
- f. Untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan monogami.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi Musdah keadilan dalam poligami merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami. Adapun keadilan poligami menurutnya harus mencakup semua aspek yaitu adil dalam hal materi dan immateri, sedangkan penakannya berlaku adil dalam hal immateri. Dan itu hal yang sulit atau bahkan mustahil untuk dipenuhi oleh suami yang berpoligami. Dari pandangan Musdah tersebut berimplikasi pada kesimpulan hukumnya *haram lighairihi* (karena aksesnya).
2. Konsep adil dalam poligami menurut Musdah Mulia bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, yang hanya mensyaratkan kadilan dalam poligami secara materi. Berbedanya konsep adil dalam poligami menurut Musdah dengan mayoritas ulama disebabkan, sebagai berikut:
 - a. Musdah menekankan keadilan immateri menjadi suatu yang harus dalam praktik poligami.
 - b. Adanya anggapan Musdah terhadap hadist Nabi bahwa Nabi melarang Ali berpoligami karena Ali tidak mampu berlaku adil dan diperkuat dengan ancaman Nabi terhadap suami yang tidak adil.
 - c. Banyaknya dampak negatif poligami yang disebabkan ketidakadilan oleh suami yang berpoligami.

B. Saran

1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat dan memahami apakah dirinya sudah yakin mampu berlaku adil karena adil merupakan syarat utama untuk bolehnya poligami sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 3. Ketika terjadi ketidakadilan dalam praktik poligami, maka hal itu akan menyalahi prinsip-prinsip Islam sebagaimana telah dijelaskan pada bab III.
2. Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap sabar dengan memberi pengertian kepada suami bahwa poligami bukanlah hal yang mudah. Jangan begitu saja mau dipoligami dengan mengatakan rela padahal hatinya berkata tidak. Ketidaksesuaian antara perkataan dan keyakinan dalam hati akan menimbulkan penyakit hati yang suatu saat memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan pribadi maupun keluarga.
3. Bagi masyarakat diharapkan jangan mudah memandang bahwa orang yang melakukan poligami tidak baik. Begitu juga dengan perempuan yang menolak ketika akan dipoligami merupakan suatu yang jelek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Azzam. *Agar Suami Tak Berpoligami*, Bandung: Ikomatuddin Press, 2007.
- ABN Nasution, *Biografi Siti Musdah Mulia*. *Repository.uinsu.ac.id*. Diunduh tanggal Januari 2021.
- Al-Haddad. *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*. Alih bahasa oleh: M Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Al-Jashshash. *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, t.t.
- Al-Jaziri, Abdul. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Qazwainy, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Jilid I*, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Amirin, Tantang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suaharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Prakttek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir: al-Jami' Baina Fanny al-Riwayah wa al-Diroyah*, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah. *Sunan at-Turmudzi Jilid 2*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Anwar, Moch. *Fiqih Islam; Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*. Alih bahasa oleh: Ali Fauzan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Azni. *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9. Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie dkk, *Fiqih Islam 9*, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Rekonstruksi Keadilan*, Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Darmadiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.t.
- Djohantini, Nordjannah. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban kekerasan Demi Keadilan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2003.
- Do'i, Abd. Rahman. *Penjelasan lengkap Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Engineer, Ashgar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Alih bahasa oleh: Farid Wajidi (Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Fahmi, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*, Bandung: Pustaka Imran, 2007.
- Fathonah, " Telaah Poligini: Persepektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer," dalam *Studi Keislaman, Volume 5., No. 1., (2015)*, h. 18
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Yatasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981
- J.N.D. Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern world*. Alih bahasa oleh: Machun Husein, Surabaya: CV Amar Press, 1991.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Wanita Antara Jodoh , Poligami & Perselingkuhan*, Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Jurjani, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-fikri, t.t.
- Kau, Sofyan Abdurrahman P. *Fikih Alternatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Setia, 2001.
- Madjid, Nurcholish. *Fikih Lintas Agama*, Jakarta: Pramadina, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Makmun, H.A. Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mubarak, Saiful Islam Mubarak. *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syamil, 2007.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Qur'an*. Alih bahasa oleh: Yaziar Radianti Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gremadia Pustaka Utama, 2007.
- , *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan islami Meraih Ridho Ilahi*, Bandung : Marja, 2011.
- , *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasinya*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- , *Muslimah Reformis : Prempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- , *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Tangerang Selatan : PT Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- Muthahhari, Murthada. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. Alih bahasa oleh: Agus Efendi, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1981.
- MZ, Labib. *Rahasia Poligami Rasulullah Saw*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Nasution, Khoiruddin . *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh* , Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Parto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Poerwardarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*. Alih bahasa oleh: As'ad Yasin, "Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Qutub, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Alih bahasa oleh: Arif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- , *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Juz IV*. Alih bahasa oleh: As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insan Press, 2002.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rawls, Jhon. *A Theory of Justice*, Alih bahasa oleh: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- RI, Departemen Agama. *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 6*. Alih bahasa oleh: Mohammad Thalib, Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Saputra, Hendri. "*Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*", Tesis: IAIN Bengkulu, 2015.
- Saputra, Hendri. "*Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*", dalam *Manthiq Vol. 1, No. 2, (2016)*, h. 133
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Sinar Baru Van Hoeve, 1984.
- Shahira, Rifka. "*Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam*", Skripsi : UIN SUSKA Riau, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Menyingkap Tabir Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2007.
- Sofyan, Aa. "*Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*", dalam *Hukum Keluarga Islam, Volume 1., No.1., (2016)*, h. 10
- Sunarto, Achmad. *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW.*, Surabaya: Ampel Mulia, 2014.
- Suriyansih, Eka. "*Merombak Struktur. Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*", dalam *Studi Agama dan Masyarakat. Volume 13, No. 2, (2017)*, h. 300.
- Syafitri, Farradilla Andriani. *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan dan Somalia (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami)*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Syah, Hidayat. *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: Dar Ahali, 1990.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syam, Masiyan M & Muhammad Syachrofi, “ Hadis-hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis al-ghazali)” dalam *Ilmu Hadis*, Vol 4., No. 1., (2019), h. 94

Syifaurrehman, Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dari Persepektif Politik Hukum di Indonesia, <https://santrikafi.blogspot.co.id/2015/05/counter-legal-draf-kompilasi-hukum.html>, diunduh 5 Januari 2021.

Ulum, *Biografi Musdah Mulia: Dalam buku Muslim Sejati*, www.mujahidahmuslimah.org. diakses 22 Januari 2021

Utomo, Bani Aziz. *Konsep Adil dalam Poligami*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Yazid, Abu. *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemperer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Yusefri, “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)” dalam *Ilmu Syariah*, Vol. 3., No. 2., (2015), h. 228



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (SUATU ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DALAM BUKUM ISLAM MENGGUGAT POLIGAMI)**", yang ditulis oleh:

Nama : **TOGUAN**
NIM : **11721100724**
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H., MH

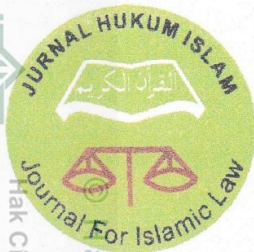
Penguji I
Dr. Johari, M.Ag

Penguji II
Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : TOGUAN

NIM : 11721100724

JURUSAN : HUKUM KELUARGA

JUDUL : KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (SUATU ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DALAM BUKU ISALAM MENGGUGAT POLIGAMI)

Pembimbing: Mutasir, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

 Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Toguan, lahir di Jorong Soma, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, pada tanggal 17 Juli 1998 dari pasangan ayahanda Nasuruddin (Alm) dan ibunda Masdalipa. Penulisan merupakan anak satu-satunya. Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan

Pendidikan Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Soma (MIS Soma), kemudian melanjutkan pendidikan SLTP di Madrasah Tsanawiyah Negeri Langsung Kadap Rao, tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan SLTA di Madrasah Aliyah Negeri Lubuk Sikaping yang sekarang berubah nama menjadi MAN 1 Pasaman, dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Ksim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Strata Satu (S1). Pada tahun 2021 dibawah bimbingan Bapak Mutasir, M.Sy. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul: *“KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (SUATU ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DALAM BUKU ISLAM MENGGUGAT POLIGAMI)”* dengan nilai Amat Baik (A).